STRATEGI KOMUNIKASI KPU BANGKALAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.) Dalam Bidang Ilmu Komunikasi



Oleh: SITI ZAENAB NIM: B76214051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 2019

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Siti Zaenab

NIM

: B76214051

Prodi

: Ilmu Komunikasi

Alamat

: Jl Halim Perdana Kusuma Griya Utama Blok I No 16

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.

- 2. Penelitian ini benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menaggung segala hukum yang terjadi

Surabaya,06Januari 2019

Yang menyatakan,



SitiZaenab

NIM. B76214051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Siti Zaenab

NIM : B76214051

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan

Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan:

Surabaya, 06 Januari 2019

Dosen Pembimbing

Dr. Nikmah Hadiati Salisah, S.IP., M.Si

197301141999032004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Siti Zaenab ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Surabaya, 07 Pebruari 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dekan,

INDE H. Abd. Halim, M.Ag.

NIP. 196307251991031003

Penguji I

Dr. Nikmah Hadiati Salisah, S.IP., M.Si NIP.197301141999032004

Penguji II

Dr. Ali Nurdin, S.Ag., M.Si

NIP. 197106021998031001

Penguji III

Muchlis, S.Sos.I., M.Si

NIP. 197911242009121001

Penguji IV

Dr. Lilik Hamidah, S.Ag., M.Si

NIP. 197312171998032002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik	a UIN Sunan Am	pel Surabaya,	yang bertanda	tangan di baw	vah ini, saya:
Nama : S	TITI ZAENAB	>			
NIM : F	376219051				
Fakultas/Jurusan : Da	akwah dan 1	Comunikas	i / ILMU	Icomuniko	125
	taenab159291				15425330334
Demi pengembangan il UIN Sunan Ampel Sural ☑ Sekripsi ☐ Tes yang berjudul : ∫TRATEGU KOM	baya, Hak Bebas sis Deser	Royalti Nor	n-Eksklusif ata Lain-lain (as karya ilmiah	:)
KABUPATEN BA	ANE KALAN	DALAIM	MENING K	ATKAN F	DARTISIPAS
MASYARAKAT 1	PADA PELAK	SANAAN	DICKADA	SERENTA	k 2018
beserta perangkat yang Perpustakaan UIN Sun mengelolanya dalam menampilkan/mempubl akademis tanpa perlu n penulis/pencipta dan ata	nan Ampel Surab bentuk pangka likasikannya di Int neminta ijin dari	aya berhak alan data ernet atau me saya selama	menyimpan, n (database), edia lain secara	nengalih-medi mendistribusil <i>fulltext</i> untu	a/format-kan kannya, dan k kepentingar
Saya bersedia untuk m Sunan Ampel Surabaya, dalam karya ilmiah saya i	segala bentuk tur				
Demikian pernyataan ini	i yang saya buat de	engan sebenar	rnya.		
			Surabaya, (I JANUA	zi 2019
				Penulis	
				Alus	

S(T) ZAENAB
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Siti Zaenab B76214051 Strategi Komunikasi Kpu Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak. Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Pemilh, Tindakan Strategis, partisipasi

Persoalan pokok yang hendak dikaji dalam skripsi ini, yaitu: bagaimana strategi komunikasi KPUD Kabbupaten Bangkalan dalam meningkatkan tingkat partisipasi,

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, dalam penelitian ini digunakanlah metode deskriptif yang berguna untuk memerikan fakta dan data mengenai strategi kpud dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan model strategi komunikasi John Middleton.

Dari basil penelitian ini ditemukan bahwa Analisis dan segmentasi khalayak juga harus dilaksanakan dengan menentukan siapa target sasaran program yang sedang dijalankan. Analisis ini sangat penting karena bentuk perencanaan akan sangat bergantung pada tipe publik yang dihadapi. Pemrogram komunikasi setidaknya harus memilah publik menjadi tiga kelompok. Pertama, Latent Public yaitu kelompok yang menghadapi masalah dan tetapi tidak mempunyai perhatian lebih. Kedua, adalah aware public, yaitu kelompok yang bertanggung jawab terhadap masalah. Sedangkan yang terakhir adalah active public yaitu kelompok yang melakukan tindakan terhadap masalah, seperti memetakan tipologi pemilih melalui kecenderungan khalayak.

Pemilihan media sangat penting dilakukan dengan memperhatikan tiap tahap sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD. Proses itupun mengalami hambatan yang paling berat yakni kesadaran politik masyrakat yang masih terbilang minim.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
KEASLIAN KARYA	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelit <mark>ian</mark>	
E. Penelitian Terdah <mark>ulu</mark>	8
F. Definisi Konsep	12
G. Kerangka Pikir	
H. Metode Penelitian	
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	29
1. Pengertian Pemilu	29
2. Kampanye Dalam Pemilu	32
3. Pengertian Pilkada	33
4. Pelaksanaan Pemilu	37
5. Penerapan dan Pengumuman DPT	38
6. Tinjauan Partisipasi Politik	39
B. Kajian Teori	47
1. Teori Strategi Komunikasi	47

2. Model Komunikasi Jhon Middleton	50			
3. Langkah-langkah Perencanaan Komunikasi	53			
BAB III PAPARAN DATA PENELITIAN				
A. Profil Data	58			
Tentang Kabupaten Bangkalan	58			
2. Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bangkalan6				
3. Profil Informan 64				
B. Deskripsi Data Penelitian				
1. Pemilihan Susunan Pemilih Berdasarkan Tipologi	Khalayak . 67			
2. Tanamkan Pentingnya Kesadaran Berdemokrasi Ke	epada Khalayak			
	70			
3. Mengutamakan Kelompok Perempuan Dalam Sosi	alisasi75			
4. KPUD Pastikan Netralitas Sebagai Penyelenggara.	76			
BAB IV HASIL PENELITIAN				
A. Analisis Data	78			
1. Pemetaan Pe <mark>nge</mark> tahua <mark>n P</mark> em <mark>ili</mark> h Me <mark>lal</mark> ui Pembagiai	n Tipologi			
Khalayak	78			
2. Pemilihan M <mark>edia yang lebih b</mark> ersifat konvensional.	81			
3. KPUD Junjung Netralitas Sebagai Penyelenggara	87			
4. Kesadaran Politik Masyarakat Yang Rendah Sebag	ai Penghambat			
Ketertiban Dalam Pemilu	89			
B. Konfirmasi dengan Teori	90			
BAB V PENUTUP				
A. Kesimpulan	98			
B Saran	100			

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Komisioner KPUD Bangkalan......61



DAFTAR BAGAN



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (PEMILU) adalah sebuah program Pemerintah sebagai sarana memilih calon pemimpin. PEMILU menjadi salah satu momen yang selalu dinanti oleh masyarakat dalam 5 tahun, karena pemilihan umum yang kita kenal sebagai PEMILU adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih calon pemimpin secara demokrasi. Dimana rakyat berhak memilih dan memberi suara pada satu calon pemimpin yang mereka yakini akan menjadi pemimpin yang baik. Menurut Sodikin "Manusia itu berdaulat penuh atas dirinya, ia memiliki hak-hak yang lahir dari dan atas diri sendiri. Kedaulatan orang yang satu tidak kurang tetapi juga tidak lebih dari yang lain. Pada situasi yang seperti itu tidak akan mungkin ada kemajuan. Maka manusia itu serentak bersamasama menyerahkan kedaulatan masing-masing kepada masyarakat, pelaksana perintah-perintah ialah negara dan pemerintah. Penyerahan itu disertai dengan satu syarat: ia berhak turut serta untuk menyusun kemauan umum, volonte generale, yang akan dijadikan kemauan negara."¹

Pemerintah berperan penting pada pelaksanaan pemilihan umum dalam memberi fasilitas yaitu adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas dalam melaksanakan pemilihan baik itu presiden maupun pemilihan kepala daerah. Dalam PKPU nomer 8 tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan

¹ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Bekasi: Gramata Publising. 2014). 12-13

mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan. Pada tahun 1999, KPU menjadi satu-satunya lembaga penyelenggara yang tertulis dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Hal itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Namun pada tahun 2017 ada perubahan perundang-undangan tentang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga penyelenggara pemilu menjadi KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Pada masa kepemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pemilihan umum dikemas dalam pemilihan serentak. Artinya, Indonesia melakukan pemilihan serentak baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah secara bersamaan dalam waktu dan tanggal yang sama. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara.²

Tentu, butuh kerja keras dan usaha yang kreatif dalam mengajak masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam PEMILU khususnya PILKADA. Karena suara rakyat adalah penentu sang pemimpin. Menghadapi masyarakat yang majemuk dengan banyak varian karakter

² Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*,(Jakarta: Mizan Republika: 2015).82

tidaklah mudah terutama dalam masyarakat awam. Butuh proses dan pendekatan sosial untuk membangkitkan antusiasme masyarakat dalam PILKADA. Masih banyak dari masyarakat kita yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam PILKADA karena banyak faktor, khususnya di Bangkalan. Hal ini sudah menjadi problematika setiap tahun politik tiba.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pemilu. Beberapa diantaranya yaitu :kejenuhan masyarakat terhadap Pemilu, kepercayaan rendah atau adanya kekecewaaan (terhadap penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu yaitu calon legislatif,calon pemimpin daerah dan partai politik), kurang daya dorong terhadap masyarakat, kesadaran masyarakat rendah. Hal ini dikarenakan kurang informasi, tidak ingin berpartisipasi, tidak tahu hari pemungutan suara dan lain-lain. (sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru).³ Selain hal diatas, menurut hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum. Naik turunnya partisipasi politik dalam pemilu disebabkan oleh berbagai hal. Antara laian:⁴

Pertama, malas. Rakyat malas untuk berpartisipasi karena mereka harus menghentikan aktivitas ekonomi mereka pada hari pemilihan. meskipun pada setiap hari pemungutan suara pemerintah mengumumkan bahwa hari tersebut adalah hari libur bagi kalangan pegawai negeri dan swasta. Kedua, tidak merubah nasib. para calon pemilih merasa bahwa

³Rafika Julia, *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum 2014*, Jom FISIP Volume 1 No. 2- Oktober 2014 .Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

-

⁴ Moch. Nurhasim (Editor), *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bekerja Sama Komisi Pemilihan Umum. Hal. 182.

suara yang mereka berikantidak mengubah nasib mereka atau meningkakan kesejahteraan ekonomi mereka. Cara pandang mereka masih sangat dipengaruhi oleh pemikiran bahwa nasib mereka seharusnya lebih baik jika mereka berpartisipasi dalam politik.

Ketiga, pengaruh pihak lain. partisipasi politik mereka dalam pemilu dalam bentuk ikut memberikan suara juga ditentukan oleh bagaimana pandangan dari kalangan pemuka agama, pimpinan 183 keluarga, atau teman. Jika orang-orang yang mereka hormati mengajak mereka untuk ikut pemilu, kemungkinan besar mereka akan berpartisipasi ikut memberikan suara mereka. Namun, bila orang yang mereka gugu dan mereka tiru serta hormati, seperti kalangan pemuka agama, menyatakan bahwa pemilu bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut, maka mereka mengikuti nasihat pemuka agama itu untuk tidak memberikan suaranya pada pemilu.

Keempat, persoalan kesukuan. Bila kandidat pemilu legislatif atau capres/cawapres tidak berasal dari suku atau etniknya, mereka enggan untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Kelima, kurangnya partisipasi politik pada kalangan muda atau pemilih pemula. Keenam, rakyat yang tingal di daerah perkotaan yang memiliki akses informasi dan transportasi yang jauh lebih baik ketimbang di daerah pedesaan, justru partisipasi politiknya dalam pemilu lebih rendah dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Ini disebabkan karena informasi yang mereka dapatkan tentang politik justru membuat mereka menjadi apatis terhadap politik dan enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ketujuh, partisipasi politik perempuan dalam pemilu justru lebih tinggi ketimbang kaum laki-laki.

Tak terkecuali di Kabupaten Bangkalan, Proses pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu kontestasi demokrasi yang paling disoroti oleh pemerintah pusat, sebab Bangkalan termasuk ke dalam zona merah, alasanya terjadi kala Pemilu 2012 Bulan Desember Tanggal 12.

Keputusan KPU Bangkalan yang mendiskualifikasi pasangan calon Imam Buchori-HR Zainal Alim (Imam-Zein). Dampak dari diskualifikasi tersebut suasana Bangkalan, Madura, semakin panas. terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan massa pendukung Imam Buchori-Zainal Alim (Zein), pasangan calon yang telah dicoret KPU Bangkalan. Bentrokan terjadi di sekitar Kantor KPU Bangkalan, Jalan Pemuda Kaffa, Bangkalan. Kericuhan pecah setelah KPU mengeluarkan logistik dari gudang untuk didistribusikan.⁵

Berkat kericuhan tersebut, kinerja KPU sebagai penyelenggara menjadi semakin sulit, pertarungan citra, kapabilitas dan asas ketidakberpihakan menjadi modal utama KPUD Bangkalan untuk menarik antusiasme masyarakat untuk tetap datang ke tempat pemungutan suara.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu terus melakukan upaya guna meningkatnya taraf partisipasi aktif yang hadir ke tempat pemungutan suara. Salah satu strateginya ialah KPU terus berupaya mensosialisasikan hari pencoblosan.

Meski begitu, Di Tahun 2012 dengan jumlah Daftar pemilih tetap sebanyak 888.928 suara, tingkat partisipasi masyarakat menyentuh angka

_

⁵ Di akses dari https://pilkada.jpnn.com/news/jelang-coblosan-polisi-massa-bentrok pada 20-09-2018

64,78 persen. Tingkat partisipasi itu dapat terbilang cukup sukses setelah rentetan kejadian yang terus menerus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada KPUD Bangkalan.

Sementara pada Tahun 2018, KPUD Bangkalan bekerja normal tanpa hambatan yang berarti, di tahun itu, jumlah daftar pemilih tetap memang terbilang menurun, alasanya tentu tingkat populasi masyarakat yang berkurang berdasarkan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. sebanyak 859.067 pemilih tercatat dalam data KPUD Kabupaten Bangkalan dengan tingkat partisipasi masyarakat telah meningkat menyetuh angka 65.29 persen.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan teknologi yang semakin berkembang, pola strategi danpendekatan KPU terhadap pemilih pun lebih menyesuaikan. Contoh sederhanya, pada tahun 2012, perkembangan media sosial tak sepesat tahun 2018, sehingga model dan strategi KPU terkesan lebih konservatif dan monolog. (pemilih segmen nitizen)

Peningkatan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, partisipasi keterlibatan pemilih pada periode sebelum pemilihan. Namun pada tahun ini, dengan perkembangan media sosial, KPU mampu membuka ruang diskusi publik dalam media sosial, seperti facebook, twitter, whatshap, instagram, dan media sosial yang lainya.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat KPU melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat untuk menyadarkan bahwa berpartisispasi dalam PILKADA sangat dibutuhkan untuk menentukan calon pemimpin yang terbaik. Artinya, sosialisasi yang sering dilakukan

-

⁶ Berdasarkan data rekapitulasi KPU Tahun 2012.

pihak KPU adalah demi kesejahteraan bersama. Namun, banyak masyarakat yang tidak mau ikut andil dalam pemilihan. Oleh karena itu dalam sosialisasi butuh komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dimana dari komunikasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Komunikasi itu sendiri menurut Raymond Ross "Komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pemikiran serupa dengan dimaksudkan yang yang oleh komunikator." Tidak hanya cukup memahami apa itu komunikasi, namun KPU juga membutuhkan sebuah strategi komunikasi untuk dapat mengambil perhatian masyarakat supaya partisipasi masyarakat meningkat.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penting kiranya peneliti ingin mengupas perjalanan KPUD Kabupaten Bangkalan mengembalikan citra dan taraf kepercayaan masyaramat sebagai pemiih dengan judul penelitian "strategi Komunikasi Kpu Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak" dengan rumusan masalah sebagai dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah "Bagaimana strategi komunikasi KPU Kab. Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Bangkalan pada PILKADA Bangkalan 2018."

⁷ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).68

Untuk mengarahkan rumusan tersebut selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan "Bagaimana strategi komunikasi KPU Bangkalan terhadap masyarakat Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PILKADA Bangkalan 2018?"

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk "mengetahui dan memahami strategi komunikasi KPU Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PILKADA Bangkalan 2018."

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dalam bidang komunikasi dan pemasaran yang berkaitan dengan kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PILKADA.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya dalam bidang Ilmu Komunikasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperluas pemahaman serta kemampuan penulisan masyarakat dan terutama mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan studi referensi peneliti berikut beberapa penelitian terdahulu:

 Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada 2015 (Studi Deskriptif Kualitatif KPU Kabupaten Bantul).

Penelitian terdahulu salah satunya adalah penelitian yang berjudul "Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada 2015 (Studi Deskriptif Kualitatif KPU Kabupaten Bantul)" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Dalam penelitiannya menjelaskan komunikasi KPU Kabupaten Bantul dalam mengurangi angka golput pada pilkada 2015 dilakukan dengan menggunakan komponenstrategi komunikasi, : Mengenali sasaran komponen seperti komunikasi, pemilihan media komunikasi, pengkajian tujuan pesan, peranan komunikator dalam komunikasi. Upaya KPU Kabuapaten Bantul untuk mengurangi angka golput pada pilkada2015 telah menggunakan beberapa metode yaitu : Metode tatap muka dan dialog secara menarik, pemanfaatan aktifitas warga untuk mempermudah pertemuan bersama pihak KPU dan masyarakat, penggunaan beberapa media cetak dan elektonik secara maksimal, serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilu.

Persamaan dari pemaparan penelitian terdahulu setidaknya ada beberapa persamaan. Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama menggunakan strategi komunikasi komisi pemiliham umum. Perbedaan sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu berfokus pada strategi komunikasi KPU dalam mengurangi angka golput pada pilkada 2015, sedangkan penelitian saat ini berfokus untuk mengetahui strategi komunikasi KPU Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PILKADA.

 Perencanaan Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Pemlihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur 2013 Di Kota Samarinda.

Penelitian dari sebuah Jurnal oleh Fachri, Perencanaan Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Pemlihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur 2013 Di Kota Samarinda. Journal Ilmu Komunikasi, FISIP UNMUL. 2015, volum 3 nomer 3. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam melakukan sosialisasi tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013 tidak melakukan perencanaan komunikasi dengan baik, sehingga tidak fokus dan konsisten terhadap pekerjaan yang dilaksanakan yang mengakibatkan gagalnya dalam mencapai tujuan sosialisasi. Belum maksimalnya penggunaan media-media lokal seperti koran, radio, televisi sebagai saluran dan media penunjang dalam melakukan sosialisasi, serta penggunaan media baru seperti internet dalam rangka penyebaran informasi terkait tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013. Dalam melakukan sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda terkendala dari dana yang dikucurkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur atau setingkat diatasnya, sehingga tidak maksimal dalam menggelar sosialisasi. Khususnya

sosialisasi yang menyasar pada fokus khalayak yang menjadi sasaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Persamaan dari pemaparan penelitian terdahulu setidaknya ada beberapa persamaan. Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama menggunakan komisi pemiliham umum kepala daerah. Perbedaan sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu berfokus pada perencanaan komunikasi komisi pemilihan umum dalam mensosialisasikan pemilihan umum kepala daerah, sedangkan penelitian saat ini berfokus untuk mengetahui strategi komunikasi KPU Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PILKADA.

3. Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum 2014.

Skripsi oleh Rafika Julia, Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum 2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi KPU Kota Pekanbaru dari segi pengenalan sasaran yaitu seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang terdaftar sebagai pemilih dan penempatan sasaran dibagi ke dalam 5 segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Setelah itu pemilihan media terbagi dalam media kelompok dan media massa sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Isi pesan yang disampaikan

oleh KPU Kota Pekanbaru bersifat pesan persuasif, edukatif dan informatif.

Persamaan dari pemaparan penelitian terdahulu setidaknya ada beberapa persamaan. Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama menggunakan strategi komunikasi komisi pemiliham umum kepala daerah. Perbedaan sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu berfokus pada strategi komunikasi komisi pemilihan umumkota Pekanbaru dalam mensosialisasikan pemilu umum 2014, sedangkan penelitian saat ini berfokus untuk mengetahui strategi komunikasi KPU Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PILKADA.

F. Definisi Konsep

Setiap penelitian pasti memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun landasan teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah peneliti akan disoroti. Kerlinger dalam (Kriyantono, 2006:06) menyebutkan teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi dan proporsi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Strategi Komunikasi

Strategi merupakan perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suau tujuan. Namun untuk mencapai

tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan untuk menunjukkan arah saja, tetapi juga harus bisa menunjukkan bagaimana taktik operasional agar semua tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*Communication Planning*) manajemen komunikasi (*management communication*) untuk mencapai suatu tujuan tersebut.⁸

2. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga -lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan merencanakan, menerima, meneliti, menetapkan, dan membentuk panitia pemengutan suara, menetapkan anggota Dprd, Bupati/Wali Kota Serta Presiden.

.

⁸ Effendy, Uchjana Onong. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung : Remadja Karya,1984). 18

3. Pilkada Serentak

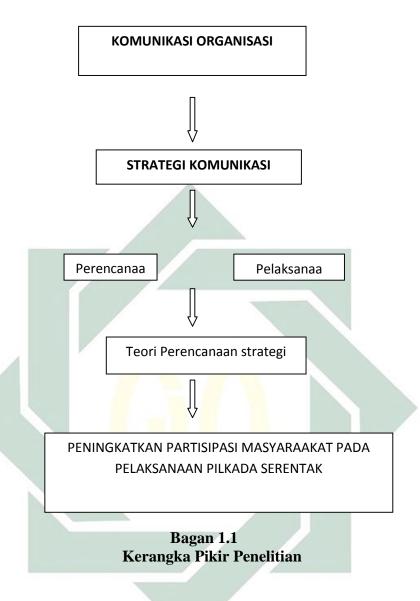
Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan PEMILUKADA atau PILKADA adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. PILKADA serentak adalah pemilihan umum secara bersamaan seperti pemilihan presiden, gubernur, bupati, walikota, DPRD/DPR RI yang dilaksanaan seacara serentak dalam hari yang sama. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam bab latar belakang masalah diatas yaitu PILKADA serentak telah diresmikan pada masa keperintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan ditetapkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Pemerintah pun pada Nomor 6 Tahun 2005 tentang "Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

-

⁹ Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, (Jakarta:sofmedia, 2012). 31.

G. Kerangka Pikir Penelitian



Secara mendasar, prinsip dasar komunikasi ialah siapa mengatakan apa dengan cara apa serta bagaimana efeknya. Maka dari itu, butuh strategi khusus dalam hal menyampaikan pesan yang baik untuk mendapatkan efek yang baik pula.

Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan

tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

Sementara Kerangka pikir diperoleh dari strategi yang dilakukan oleh KPU Bangkalan. Dalam melakukan pilkada serentak, tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya berdemokrasi di kabupaten Bangkalan. Maka Kerangka penelitian yang berjudul "Strategi Komunikasi KPU Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak" yang menjadikan fokus penelitian dan menggunakan ikut berpartisipasi karena itu butuh pengertian dan pengetahuan terhadap pemilihan umum di Bangkalan.

Maka dari itu, KPUD Bangkalan menyampaikan pesan bahwa pentingnya demokrasi dengan cara mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, mulai dengan cara yang paling konvensional yaitu memasang banner atau baliho serta bertatap muka dengan masyarakat (pemilih) sampai dengan cara mempulikasikan setiap kegiatan di media social atau mengiklankan banner ke media mainstream.

Selain itu motivasi dan juga dukungan agar masyarakat berani dalam berpartisipasi dan tujuan dari pemilu. Penelitian dapat dilakukan dengan lima langkah strategis yaitu perumusan visi dan misi, pengkajian lingkungan eksternal, pengkajian lingkungan internal, perumusan isu-isu, penyusunan strategi pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat. Penelitian ini akan dihasilkan dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting, karena berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dari bagaimana peneliti menentukan metode yang akan dilakukan. Titik tolak penelitian bertumpu pada minat untuk mengetahui masalah atau fenomena social yang timbul karena berbagai rangsangan, dan bukanlah pada metodologi penelitian. Sekalipun demikan, tetap harus di ingat bahwa metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga reliabilitas dan validalitas hasil penelitian. ¹⁰

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis Penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yangberupaya untuk menemukan data secara rinci dari kasus tertentu,bertujuan utnuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam dalam jenis kualitatif ialah fenomena yang diteliti merupakan kesatuan antara subjek dan lingkungan sosial.¹¹

Pada peneliti ini menggunakankualitatif deskriptif, karena peneliti ini berdasarkan fenomena nyata dan pengambilan data tentang strategi komunikasi kpu kabupaten bangkalan dalam

Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 42 ¹¹Haris Herdiansyah.MetodologiPenelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba

¹⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 42

Humanika, 2011), hlm 9

meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak yang diperoleh dari proses wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian.

2. Subyek, Obyek, dan Lokasi Penelitian.

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat peneliti memperoleh keterangan tentang permasalahan yang diteliti, singkatnya subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. ¹²Subjek dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Bngkalan, Devisi SDM dan partisipasi masyarakat.

b. Obyek Penelitian.

Obyek penelitian ini ilmu komunikasi yang berkaitan mengenai strategi komunikasi KPU. Jadi, dengan obyek penelitian tersebut dapat digunakan penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian menjadi sebuah data nyata dan dapat mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi KPU kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bangkalan. Alasan peneliti menganbil lokasi Bangkalan dikarenakan peneliti akan meneliti bagaimana strategi komunikasi KPU Kabupaten

.

¹²Tatang, M. Amirin, "*Menyusun Perencanaan Penelitian*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), p. 66-71.

Bangkalan dalam meningktkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Penelitian

Pada Sub bab ini peneliti akan memaparkan mengenai kategori data apa saja yang akan peneliti dapatkan serta dari mana saja asal dari data tersebut.

1) Data Primer

Data primer adalah data tangan pertama. Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran¹³. Atau sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari data primer ini peneliti mampu mendapatkan data valid yang sesuai dengan tema danrumusan masalah yang ada. Sumber data primer ini yang langsung memberikan data kepada peneliti¹⁴. Sumber data primer dari penelitian ini adalah strategi komunikasi ketua KPU Kabupaten Bangkalan, devisi SDM dan partisipasi masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Bangkalan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti untuk mendukung data primer. Data sekunder ini seperti buku-buku mengenai teori-teori yang berkaitan dengan strategi komunikasi

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008, hlm: 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹³Saifuddin Azwa, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm: 91.

dan buku-buku sejenis yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder juga didapat dari buku *online*, jurnal dan artikel.

b. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data library research dan field research.

1) Library Research

Penelusuran data dengan menggunakan bantuan buku-buku yang ada di Perpustakaan. Digunakan untuk mencari landasan-landasan teori tentang unsur-unsur pada penelitian ini. Seperti buku pengantar ilmu komunikasi dan teori komunikasi.

2) Field Research

Dalam hal ini merupakan informan, merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun pemilihan informan ditentukan berdasarkan teknik *Purposif Sampling* yang mana informan akan dipilih sesuai dengan kriteria tertentu agar data yang didapat lebih mendalam dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Kriteria informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yang mana peneliti menetapkan responden berdasarkan anggapan bahwa responden yang dipilih, sampel informan yang diambil didasarkan pada pertimbangan tertentu dan informan yang dimaksud dalam penelitan ini adalah sejumlah tokoh.

4. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada 3 tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan pengambilan data.

a. Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan ini peneliti melakukan berbagai persiapan, baik itu konsep penelitian serta perlengkapan penelitian yang di butuhkan pada saat penelitian di lapangan. Diantaranya langkah-langkah yang di lakukan peneliti pada saat pra lapangan adalah:

- 1) Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian), meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian hasil penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka pikir penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan analisi data serta teknik keabsaan data.
- 2) Memilih lokasi penelitian dari rancangan penelitian maka akan di temukan lokasi yang tepat sesuai konteks penelitian, dalam hal penelitian ini peneliti mengambil judul"strategi komunikasi kpu kabupaten bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak tgl 27 juni 2018". Menilai lokasi penelitian, melihat bagaimana kondisi lapangan yang di gunakan untuk penelitian dan menyiapkan format pertanyaan wawancara yang akan di ajukan kepada informan.

- 3) Memilih dan memanfaatkan informan, berdasarkan konteks penelitian disini informan harus suka relawan memberikan informasi yang rinci dan informan harus memiliki pengalaman sesuai dengan konteks penelitian.
- 4) Menyiapkan perlengkapan, hal ini bisa meliputi izin penelitian dan juga perlengkapan kecil yang di gunakan pada saat wawancara.

b. Pekerjaan Lapangan.

Pada tahap ini lebih difokuskan pada pencarian dan pengumpulan data di lapangan, serta mengamati segala bentuk aktivitas pada lokasi penelitian. Pada tahap ini bisa juga di lakukan menulis catatan kecil pada saat di lapangan serta rekaman suara, ini berguna untuk mengingat akan informasi dan data-data agar tidak mudah hilang.

1) Penulisan Laporan.

Tahap ini adalah tahap akhir dimana peneliti menuangkan hasil dari penelitian melalui suatu laporan. Pada tahap ini perlu diperhatikan keabsaan data dari mulai fokus penelitian sampai dengan analisis data dan juga harus menunjang sistematika penulisan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau halhal atau keterangan-keterangan sebagaian atau seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Penelitian mempunyai beberapa teknik dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakantiga teknik, antara lain:

a. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik. Observasi langsung dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁵. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancaara tidak terstruktur, dimana didalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

Adapun dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara antara lain dengan ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Devisi SDM dan partisipasi masyarakat, dan masyarakat

186.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hlm.

Bangkalan. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan buktiyang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan / tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

Dalam hal ini proses dokumentasi adalah catatan seputar strategi komunikasi kpu kabupaten bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak dokumentasi kegiatan berlangsungnya wawancara. Selanjutnya dokumentasi ini juga berupa dokumen yang dibuat secara pribadi oleh peneliti berupa foto-foto tentang objek penelitian yang diambil saat penelitian berlangsung.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Beberapa teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti:

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data perlu adanya identifikasi satuan (unit), pada mulanya perlu diidentifikasikan adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian¹⁶.

Hasil penelitian yang diperoleh informan yakni dari strategi komunikasi kpu kabupaten bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak akan dirangkum dan dipilih sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar mempermudah proses analisis data.

b. Display Data

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data selanjutnya memverifikasikan data sehingga menjadi kebermaknaan data.

Dalam penelitian ini display data peneliti mendeskripsikan data yang didapat dari wawancara dengan informan tentang bagaimana strategi komunikasi kpu kabupaten bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak tgl 27 juni 2018dan dideskripsikan secara naratif.

c. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification)

_

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hlm 288.

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data serta member penjelasan. Selanjutnya apabila penarikan kesimpulan dirasakan tidak kuat, maka perlu adanya verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan maknamakna yang muncul dari data. Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan¹⁷.

Penarikan kesimpulan berupa kegiatan evaluasi dan penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan sebagai penarikan makna yang telah disajikan. Untuk pemberian makna tentu saja sesuai dengan pemahaman peneliti. Dalam penelitian ini yang di maksud verifikasi data dan penegasan kesimpulan yaitu setelah data mengenai perilaku komunikasi konsumen dideskripsikan kemudian ditarik kesimpulan bagaimana proses strategi komunikasi kpu kabupaten bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak tgl 27 juni 2018. Apabila dirasa kurang kuat kesimpulannya barulah diinterprestasikan tentang data wawancara maupun observasi.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

¹⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 92-99.

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 18

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan dengan cara menjalin komunikasi yang harmonis secara terus menerus dengan informan selama 2 minggu, dalam hal ini peneliti juga ikut serta dalam kegiatan informan.

b. Penggalian Data Melalui Referensi yang Memadai

Peneliti berusaha mengumpulkan literatur sebanyak mungkin berupa buku-buku komunikasi, buku-buku yang membahas metode penelitian kualitatif sebagai referensi dan bahan perbandingan dengan data-data yang terkumpul melalui proses pengumpulan data.

Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada maksud yang sesuai judul, maka pembahasan ini penulis susun menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan tentang apa yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian ini. Permasalahan apa saja yang mungkin

-

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hal 321.

muncul, kemudian pengidentifikasian masalah serta, perumusan masalah yang ingin diteliti. Selain itu, dijabarkan juga tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka konsep penelitian, faktor penghambat dan pendukung penelitian, sistematika penelitian dan jadwal penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang beberapa istilah dan teori yang berfungsi sebagai landasan peneliti dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan.

BAB III : PENYAJIAN DATA PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tinjauan tentang strategi komunikasi kpu kabupaten bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada serentak tgl 27 juni 2018 dan Identitas Informan dan data penelitian

BAB IV: TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup penyajian data hasil-hasil temuan dilapangan, baik secara observasi, wawancara, maupun dokumentasi, data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan yaitu analisis resepsi

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai hasil rangkuman dari semua bab yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah memilih seorang pemimpin, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan programprogramnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama di waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan

¹ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Prisma Media, Jakarta, 2004) hlm: 29.

disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

Hak Pilih dalam Pemilu Pada azasnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a) Hak pilih aktif (hak memilih)
- b) Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih. Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan; tidak terganggu jiwa/ ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah

_

² Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009) hlm. 168

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- ✓ Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Depatemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- ✓ Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- ✓ Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

2. Kampanye dalam Pemilu

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masingmasing

Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk:

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Tatap muka;
- c) Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) Pemasangan alat peraga; f) Rapat umum; dan

e) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ atau telivisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah "mencuri start". Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara Nasional, baik mengenai waktu, tata cara dan tempat kampanye di pusat, diatur dengan peraturan KPU. Sedangkan ketentuan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi diatur dengan keputusan KPU Provinsi dan mengenai waktu dan pelaksaan kampanye di tingkat Kabupaten/ Kota, diatur dengan keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

3. Pengertian Pilkada

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk

mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.³

Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang "Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan
Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. *Pertama*, sistem demokrasi langsung melalui

_

³ Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah* (*Pemilukada*) dan Mekanisme PenyelesaiiannyaI. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44.

pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekruitmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).

Kedua, dari sisi kompetensi politik. Pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan "syndrome" dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak fair, seperti; praktik politik uang (money politics).

Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Keempat, pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balance) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

Mekanisme dan prosedur pemilihan. Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjaringan bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.

- a. Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah. Dominasi peranan DPRD dalam Pemilukada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan DPRD tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.
- b. Mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah. Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah.
- c. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD. Pemilihan Kepala
 Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan
 resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan
 DPRD.
- d. Hubungan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/ Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

4. Pelaksanaan Pemilu

Proses pelaksanaan Pemilukada diatur dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 65 dan 66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa "masa persiapan Pemilukada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah".

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam tahap tersebut meliputi beberapa tahapan, yakni; a. Penetapan daftar pemilih; b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c. Kampanye; d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

5. Penetapan dan Pengumuman Dafar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih dan telah tercatat sebagai calon pemilih dalam pesta demokrasi pada suatu daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang "Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" Pasal 3 dikemukakan bahwa "Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih". Dimana pemilih seperti juga tercantum pada pasal 4 ayat (2) harus memenuhi syarat:

Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan c.

Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

Pemutakhiran data pemilih diatur dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.

6. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik

6.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya.

Suatu realitas, bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan anggota masyarakat acapkali harus berbenturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan Negara. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh Khairudin (2000) mendefinisikan partisipasi sebagai "The taking part in one or more phases og the procees" atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Sedangkan menurut Fithriadi, dkk. (1937) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu proses pengambil bagian dalam suatu tahapan atau kegiatan tertentu.

6.2 Pengertian Partisipasi Politik

Istilah partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik; pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya; menteri luar negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan luar negeri. Kadang-kadang istilah tersebut. lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas politik; warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik. Analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Di dalam masyarakat tradisional, pemerintahan dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil. Istilah "partisipasi politik" telah digunakan dalam pelbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi (umpanya: informasi politik, persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri, suatu keyakinan bahwa orang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah)?

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.

Aspek inti dari definisi partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. Sebagai kontras, sementara sarjana mendefinisikan partisipasi politik sebagai juga mencakup orientasi-orientasi para warganegara terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata. Partisipasi politik didefiniskan sebagai mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

John Stuart Mill dalam Miriam Budiardjo (1994) menyatakan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik dapat menyebabkan pengembangan kapasitas pribadi "tertinggi dan serasi" dalam rangka menuju jalan kebebasan dan pengembangan diri. Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan

untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.

6.3 Jenis-jenis Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku sebagai berikut

- Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam proses pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentukbentuk partisipasi politik lain, termasuk kegiatan membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya. Namun demikian, ada suatu kumpulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan satu sama lain yang difokuskan sekitar siklus pemilihan dan pemungutan suara dan dengan jelas dapat dibedakan dari bentuk-bentuk utama lainnya dari tindakan politik.
- b. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud

- mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindak kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluasan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Rousseau menyatakan bahwa "Hanya melalui partisipasi seluruh warga negara dalam kehidupan politik secara langsung dan bekelanjutan negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan sebagai kehendak bersama Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam sistem Pemilu. Partisipasi masyarakat dapat

dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, perhitungan cepat hasil pemilu (*quick count*), dengan ketentuan.⁴:

- Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu
- 2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu
- 3. Bertujuan meningkatakan partisipasi politik masyarakat secara laus
- 4. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Berbagai bentuk partisipasi politik tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup antara lain:

- a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara.
- b. Lahirnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi masukan terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya kampanye

٠

⁴ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu*, op. cid,hlm. 263-264

menjadi pemilih aktif, menjadi anggota DPR, menjadi calon presiden yang dipilih langsung dan sebagainya.

d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, dan sebagainya.

6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Myron Weiner paling tidak ada 5 faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini:

- a. Modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini misalnya kaum buruh, para, pedagang dan para profesional.
- b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan- kebijakan pemerintah.

- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- d. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.
- e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

B. Kajian Teori

1. Teori strategi komunikasi

Kata strategi berasal dari bahasa yunani klasik, yaitu "'stratos" yang artinya tentara dan "'agein" yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. ⁵ Lalu muncul kata strategos yang artinya pemimpin tertara tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer

.

⁵ Prof, H. Hafied Cangara, M,Sc, Phd, *perencanaan dan strategi komunikasi*, (Jakarta, PT. Raja Grasindo)

yang bisa diartikan sebagai strategi perang (*the art of general*), atau suatu rancangan terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicampakan, yakni "tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali apa yang akan dikerjakan oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya,".

Karl Von Clausewis (1780-1831) seorang pensiunan jendral prusia dalam bukunya *on war* merumuskan strategi ialah "suatu seni menggunakan sarana pertemuran untuk mencapai tujuan perang," secara garis besar strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh para praktisi. Karena itu para pakar strategi tidak saja lahir dari kalangan berlatar belakang militer, tetapi juga dari profesi lain. Dalam mengangani maslah komunikasi, para perencana dihadapakan pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dengan strategi penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai yang ingin dicapai.

Rogers (1982) memberi batasan pengertian komunikaasi sebagai sesuatu rancangan yang dibuat untk mengubah tingkah laku manusia dalam skala lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Pemilihan strategi menjadi komponen paling penting dalam mencapai tujuan akhir dari komunikasi, pemilihan strategi merupakan langkah krusial memerlukan penanganan secara hatihati dalam perencanaan komunikasi. Sebab, jika salah atau keliru dalam menetukan strategi maka hasil yang diperoleh bisa

.

⁶ ibid

fatal, terutama kerugian dari segi waktu, tenagam materi dan tenaga. Oleh karena itu strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para perencana.

Strategi adalah dibuat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Karena dalam tindakan mencapai tujuan, kekuatan dan kelemahan akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna. Karena dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki akan lebih mudah untuk mengoptimalkannya, Sebaliknya jika kita mengenal kelemahan, Kita akan bisa menghindari atau bahkan berusaha menciptakan kekuatan dari kelemahan tersebut.

Tidak dapat ditolak bahwa strategi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Untuk itu seorang ahli strategi tidak bisa membuat strategi dengan sembarangan. Untuk hal itu, Pengetahuan tentang pengertian strategi sangatlah penting. Jika pembuat strategi faham apa itu strategi, besar kemungkinan akan bisa menciptakan strategi yang lebih baik.

Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan kepada beberapa persoalan terutama dalam penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Rogers (1982) memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku seseorang

dalam skala besar melalui ide-ide baru. Dalam artian khususnya, strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, media, penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal, sebab pemilihan strategi komunikasi menjadi hal yang paling krusial dan memerlukan ketelitian dalam proses perencanaan strategi komunikasi.

2. Model Perencanaan Komunikasi John Middleton

Model Perencanaan Komunikasi John Middleton ini banyak diimplementasikan untuk kampanye sosial, pemasaran komersial dan jasa hingga pemasaran politik. Model ini lebih rinci, diawali dengan riset dan upaya untuk mengetahui kebutuhan khalayak. Model perencanaan komunikasi John Middleton memiliki 10 tahapan, yaitu: pengumpulan data baseline dan need assessment, perumusan tujuan komunikasi, analisis perencanaan dan pengembangan strategi, analisis dan segmentasi khalayak, pemilihan media, desain dan pengembangan pesan, perencanaan manajemen, pelaksanaan pelatihan, implementasi dan evaluasi program.⁸

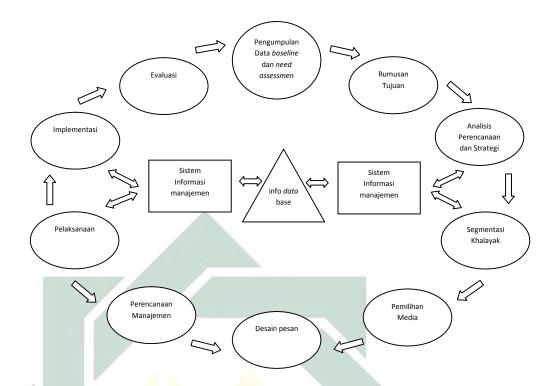
John Middleton juga menguraikan beberapa pendekatan perencanaan komunikasi sebagai berikut :

.

⁷ Prof, H. Hafied Cangara, M,Sc, Phd, *perencanaan dan strategi komunikasi*, (Jakarta, PT. Raja Grasindo)

⁸ Prof, H. Hafied Cangara, M,Sc, Phd, *perencanaan dan strategi komunikasi*, (Jakarta, PT. Raja Grasindo)

Pertama, pendekatan proses adalah suatu cara memandang masalah perencanaan komunikasi dilihat dari fungsi dan proses kegiatan komunikasi itu sendiri yang meliputi penerapan berbagai teori, mulai dari teori pembangunan, teori sosiologi, teori komunikasi dan teori organisasi. *Kedua*, pendekatan sistem adalah cara pandang terhadap perencanaan komunikasi sebagai suatu sistem yang merupakan suatu kesatuan dari sub-sub sistem komunikasi yang terkorelasi, baik secara struktural maupun fungsional. Ketiga, pendekatan teknologis adalah suatu cara pandang terhadap perencanaan komunikasi dengan perhatian aspek-aspek teknologi sebagai pendukung pada perencanaan k<mark>om</mark>unikasi. *Keempat*, pendekatan ekonomis adalah suatu cara pandang terhadap perencanaan komunikasi dengan perhatian kepada aspek-aspek ekonomi sebagai pendukung utama perencanaan komunikasi. Kelima, pendekatan evaluasi adalah suatu cara pandang terhadap perencanaan komunikasi dengan menekankan kepada pandangan dan penilaian yang di informasikan mengenai efektifitas program kegiatan yang sifatnya berkelanjutan.



Gambar 11 Model Perencanaan Komunikasi oleh John
Middleton

Model perencanaan strategi komunikasi menurut John Middleton ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan kampanye baik yang bersifat nasional, kampanye sosial maupun kampanye daerah. Misalnya kampanye tentang bahaya tentang penceramaran lingkungan, kependudukann, peningkatan produksi tanaman pangan, gerakan mencintai produksi dalam negeri, kesadaran membayar pajak, dan sebagainya. Model ini lebih rinci dan diawali dengan tindakan rised tentang pengumpulan *data base* dan upaya untuk mengetahui kebutuhan khalayak, (need assesment). Model ini bisa juga diaplikasikan

untuk kegiatan pemasaran jasa komersial, serta pemasaran politik.

Model ini juga cukup spesifik, karena dalam proses tahapan perencanaan ia berbasis *database*. Sistem informasi manajemennya memberi kontribusi dalam analisis perencanaan dan pengembangan strategi serta analisis dan segmentasi khalyak. Demikian pula pelakasaaan program berbasis sistem informasi managemen. Model perencanaan komunikasi yang dibuat oleh John Middleton lebih rinci dan dijabarkan dalam sepuluh tahapan yakni.

- 1. Pengumpulan database line dan need assesment
- 2. Perumusan tujuan komunikasi
- 3. Analisis perencanaan dan pengembangan strategi
- 4. Analisis dan segmentasi khalayak
- 5. Pemilihan media
- 6. Desain dan pengembangan pesan
- 7. Perencanaan managemen
- 8. Pelaksanaan pelatihan
- 9. Implementasi atau pelaksanaan
- 10. Evaluasi program.

3. Langkah-langkah Perencanaan Komunikasi

Perencananan komunikasi yang baik dapat menentukan keberhasilan program yang akan diimplementasikan ke masyarakat.

Menurut Middleton, perencanaan komunikasi yang baik memiliki

beberapa tahapan yaitu, 1) pengumpulan data base line dan need assessment; 2) perumusan objective komunikasi; 3) analisis perencanaan dan pengembangan strategi; 4) analisis dan segmentasi khalayak; 5) pemilihan media; 6) mendesain dan pengembangan pesan; 7) perencanaan manajemen; 8) pelaksanaan pelatihan; 9) implementasi atau pelaksanaan; 10) Evaluasi program. Berikut ini penjelasan masing-masing tahapan tersebut:

1. Pengumpulan data base line dan need assessment

Pengumpulan data base line menjadi hal yanng sangat penting dalam perencanaan komunikasi. Setiap aspek perencanaan akan mengacu pada data base line atau penelitian. Kegiatan penelitian ini akan dihasilkan data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data dari masyarakat yang langsung berhadapan dengan masalaha yang akan dihadapi. Data primer didapat dari interview, polling, ataupun focus group discussion (FGD). Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang bisa menjadi rujukan pelaksanaan program. Data pendukung ini bisa berupa informasi dari media cetak ataupun elektronik serta kebijakan-kebijakan yang berlaku atau berhubungan dengan program. Isu-isu strategis juga harus menjadi perhatian dalam pengumpulan data ini. Sedangkan need assessment adalah mendata apa saja yang dibutuhkan selama proses akan berlangsung. Mendata sumberdaya apa saja yang bisa digunakan dalam program.

2. Perumusan objective komunikasi

Penentuan tujuan bisa dilakukan dengan memperhatikan masalah yang dihadapi dan akhirnya merumuskan bagaimana keadaan masalah tersebut setelah program dilaksanakan. Penentuan tujuan harus spesifik supaya dengan jelas dan komprehensif bisa dilaksanakan. Kemudian objective dari sebuah program haruslah terukur apalagi saat dilakukan evaluasi. Kemudian objective harus bisa dijangkau dengan sumberdaya yang ada. Objective kemudian harus realistis sesuai dengan waktu yang tersedia dan budget yang ada beserta sumber daya lain.

3. Analisis perencanaan dan pengembangan strategi

Strategi adalah cara yang disusun seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai objective yang ditentukan. Strategi ini merupakan dasar dari taktik yang akan dibuat dalam setiap keadaan di lapangan.

4. Analisis dan segmentasi khalayak

Analisis dan segmentasi khalayak juga harus dilaksanakan dengan menentukan siapa target sasaran program yang sedang dijalankan. Analisis ini sangat penting karena bentuk perencanaan akan sangat bergantung pada tipe publik yang dihadapi. Pemrogram komunikasi setidaknya harus memilah publik menjadi tiga kelompok. Pertama, Latent Public yaitu kelompok yang menghadapi masalah dan tetapi tidak mempunyai perhatian lebih. Kedua, adalah aware public, yaitu kelompok yang bertanggung jawab terhadap masalah. Sedangkan

yang terakhir adalah active public yaitu kelompok yang melakukan tindakan terhadap masalah.

5. Pemilihan media

Pemilihan media sangat penting dilakukan dengan memperhatikan tiap tahap berikut ini.Pertama mendaftar media yang sudah ada. Semua media yang mungkin mendukung program komunikasi di data dan bila perlu dikelompokkan menurut keperluan program. Setelah pendataan dilakukan evaluasi, media mana saja yang sesuai dari segi waktu, jangkauan segment, biaya, dan efektifitas.

6. Mendesain dan pengembangan pesan

Pendesainan dan pengemasan pesan harus dilakukan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, segment dan berpanduan pada teoriteori dan keilmuan yang ada.

7. Perencanaan manajemen

Perencanaan manajemen bisa bisa perancangan struktur manajerial beserta job deskripsi masing-masing. Mekanismemekanisme perlu disiapkan dalam hal ini misal, bagaimana alur dana berjalan. Selain itu bagaimana koordinasi dilakukan dilapangan, dan sebagainya.

8. Pelaksanaan pelatihan

Pelatihan diperlukan dalam membangun kesiapan dalam pelaksanaan program. Perlu diadakan replikasi sebelum eksekusi program dilaksanakan. Selain itu juga pelatihan penguatan konsep program. Fasilitator juga butuh untuk dilatih supaya pelaksanaan

berjalan lebih lancar tanpa kendala yang berarti. Selain itu penyiapan konsultan juga diperlukan untuk mengawasi berjalannya program. Lokakarya dan diseminasi juga perlu diadakan untuk menyaipkan semuanya sebelum pelaksanaan

9. Implementasi atau pelaksanaan

Implementasi bisa dilakukakan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Beberapa hal yang umum dilakukan adalah melakukan lobby-lobby, silaturahmi, dan sosialisasi. Pembentukan sistem pengontrol di lapangan juga biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya masyarakat sendiri. Tentunya hal ini bergantung pada lobby-lobby yang telah dilakukan tersebut.

10. Evaluasi program

Evaluasi Program dibutuhkan untuk melihat apa saja tindakan dalam program yang tepat dan mana yang tidak sehingga ke depannya bisa dilakukan program yang lebih baik. Evaluasi bisa dibagi menjadi dua yaitu evaluasi ongoing dan end review. Evaluasi ongoing dilaksanakan selama proses berlangsung dan akan menjaga fleksibilitas sebuah program. Sedangkan end review mencakup semua evaluasi dari awal sampai akhir yang akan merangkum semua evaluasi ongoing dan perbaikannya sehingga bisa dijadikan pijakan untuk pelaksanaan program berikutnya.

BAB III

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Profil Data

1. Tentang Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan sebuah kabupaten di pulau adalah Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura; berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat. Pelabuhan Kamal merupakan pintu gerbang Madura dari Jawa, di mana terdapat layanan kapal feri yang menghubungkan Madura dengan Surabaya (Pelabuhan Ujung). Saat ini telah beroperasi Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Kabupaten Bangkalan merupakan salah wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang kertosusila.

Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Bangkalan. Sejak diresmikannya Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan menjadi gerbang utama Pulau Madura serta menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Jawa Timur, baik dari keindahan alamnya (Bukit Jaddih, Gunung Geger, Pemandian Sumber Bening -Langkap

- Modung dsb); budaya (Karapan sapi, dsb), serta wisata kuliner di antaranya adalah nasi bebek khas Madura.¹

Dari data SUSENAS tahun 2008, dapat diketahui bahwa penduduk kabupaten Bangkalan yang sementara masih mengenyam pendidikan dasar (umur 15 tahun) sebesar 89,98 persen dari total kelompok umur tersebut, sedangkan penduduk yang tidak/belum pernah sekolah 1,34 persen dan penduduk yang tidak bersekolah lagi mencapai 8,68 persen. Kelompok umur yang masuk pendidikan dasar 7-12 tahun untuk SD dan 13-15 untuk SMP. Dengan rincian persentase untuk kelompok umur SD (7-12 tahun) dengan 97,41 persen dari total keseluruhan penduduk pada umur tersebut. Sedangkan untuk tingkatan pendidikan menengah (umur 16-18 tahun), penduduk yang masih sekolah sebesar 39,11 persen, penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 3,77 persen dan penduduk yang tidak bersekolah lagi mencapai 57,12 persen. Untuk pendidikan tinggi (umur 19-24 tahun), penduduk yang masih sekolah sebesar 4,98 persen, penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 6,98 persen dan penduduk yang tidak bersekolah lagi mencapai 88,04 persen.

Dari data-data di atas, menunjukkan bahwa minat penduduk kabupaten Bangkalan dalam menuntut ilmu masih rendah. Di mana pada kelompok usia muda (16-18 tahun) hanya 39,11 persen yang masih sekolah, artinya hampir 61 persen penduduk Bangkalan berusia muda yang seharusnya menuntut ilmu di bangku sekolah SMU/ SMK/ MA sudah tidak sekolah.

_

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bangkalan diakses pada tanggal 17 desember 2018

Angka indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dijadikan dasar dalam penentuan klasifikasi status pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang terdiridari 3 indikator, yaitu:

- a.Indikator Kesehatan ; Diwakili oleh komponen Angka Harapan Hidup (Life Expectancy At Age 0:e0).
- b.Indikator Pendidikan; Diwakili oleh komponen Angka Melek Huruf orang dewasa (Adult Leteracy Rat: Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (Means Years School, MYS).
- c.Indikator Daya Beli (Purchasing Power Parity) merupakan ukuran yang sudah disesuaikan dengan kesamaan nilai daya beli.

Di antara ketiga indikator tersebut saling mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dengan pendidikan tinggi masyarakat cenderung mempunyai pengetahuan dan kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan, sehingga diharapkan berpeluang hidup lebih lama. Begitu pula dengan pendidikan tinggi dapat diperkirakan masyarakat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang lebih mapan dibandingkan dengan mereka yang bependidikan rendah, sehingga kemampuan daya beli (tingkat kesejahteraan) lebih tinggi.

2. Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bangakalan

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi (Sorensen, 2003:21).

KPUD Bangkalan adalah komisi pemilihan umum daerah di Kabupaten Bangkalan yang beralamat di jalan RE. Martadinata. Dalam keputusan surat ketua komisi pemilihan umum republik Indonesia Nomor: 152/HK.07.3SD/01/KPU/X2018 perihal pembagian divisi anggota KPU, KPU Provinsi menetapkan. Divisi KPUD Bangkalan terdiri dari lima orang.

NO.	DEVISI	JABATAN DALAM DEVISI	КЕТ
		KETUA	
1.	Devisi keuangan,	Moch. Fauzan Ja'far,	Kebijakan dalam:
	umum, logistik dan	S.Ag, MH	1. Administrasi perkantoran,
	rumah tangga.		kerumahtanggaan dan
			kearsipan;
			2. Protokol dan persidangan;
			3. Pengelolaan dan pelaporan
			barang milik negara
			4. Pelaksanaan,
			pertanggungjawaban dan
			pelaporan keuangan;
			5. Peresmian keanggotaan dan
			pelaksaan sumpah janji;

			6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;
2.	Devisi teknis penyelenggaraan.	Badrun, S.Sos	 Kebijakan Dalam: Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; Verifikasi partai politik dan DPD; Pencalonan peserta pemilu; Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; Penetapan hasil dan pendokumentasian hasi-hasil pemilu dan pemilihan;
			6. Pelaporan dana kampanye;7. PAW anggota DPRD;
3.	Devisi sosialisasi, pendidikan pemilihan, partisipasi masyarakat dan SDM.	Faisal Rahman, SH	 Kebijakan Dalam: Sosialisasi kepemilihan; Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; Publikasi dan kehumasan; Kampanye pemilu dan pemilihan; Pengelolaan informasi dan komunikasi; Kerjasama antar lembaga; PAW anggota KPU kabupaten; Rekrutmen badan adhoc; Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM; Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; Diklat dan pengembangan SDM; Penelitian dan pengembangan kepemiluan; Pengelolaan dan pembinaan SDM; Pengelolaan dan pembinaan SDM;
4.	Devisi perencanaan, data dan informasi.	Tajul Anwar, SH	Kebijakan Dalam: 1. Penyusunan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan

		5.	berkaitan dengan tahapan
		6.	pemilu; Pengelolaan aplikasi dan jaringanIT;
		7.	Pengelolaan informasi;
		8.	Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional;
		9.	Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
5.	Devisi hukum dan Zainal Arifin, SH	Kel	bijakan Dalam:
	pengawasan	1.	
			keputusan;
		2.	Telaah dan advokasi hukum;
		3.	Dokumentasi dan publikasi
			hukum;
		4.	Pengawasan dan
			pengendalian internal;
		5.	Penyelesaian sengketa proses
	/ M / M		dan hasil pemilu;
		6.	Penyelesaian pelanggaran,
			administrasi dan etik.

Meningkatnya Partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak- hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak-hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum. KPUD juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena

tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bangkalan sempat menjadi buah bibir dikancah nasional ketika proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada 12 Desember 2012. Pelaksanaan Pilkada Bangkalan yang sempat diwarnai kericuhan berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan Imam Buchori Kholil-Zainal Alim yang dicoret dari daftar peserta menuding KPU Bangkalan telah berkonspirasi dengan pasangan pemenang, Ibnu Fuad-Mondir A Rofii. Imam Buchori-Zainal merupakan pasangan yang tercoret dalam detik-detik akhir menjelang pemilihan suara. Atas putusan itu, sejumlah massa Buchori merasa tidak terima. Mereka kemudian membuat kericuhan dalam pelaksanaan Pilkada Bangkalan 2012.

Meski begitu, Di Tahun 2012 dengan jumlah Daftar pemilih tetap sebanyak 888.928 suara, tingkat partisipasi masyarakat menyentuh angka 64,78 persen.² Tingkat partisipasi itu dapat terbilang cukup sukses setelah rentetan kejadian yang terus menerus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada KPUD Bangkalan.

3. Profil Informan

a. Faisal Rahman

Faisal Rahman adalah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, beliau sudah menjadi komisioner KPUD Bangkalan selama satu periode terhitungg sejak 2014. Beliau lahir 16 Februari 1984, sebelumnya pernah mempunyai pengalam pekerjaan PNPM Mandiri

² Berdasarkan data rekapitulasi KPU Tahun 2012.

Perkotaaan Tahun 2013 dengan jabatan sebagai Konsultan Manajemen Prop.Jatim. pernah memasuki bidang pengorganisasian BEM FH.Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2007 dengan jabatan Ketua, Organisasi HMI. Cab. Bangkalan Tahun 2008 dengan jabatan Kabid Hukum dan HAM.

b. Fauzan Jakfar

Fauzan Jakfar adalah ketua komisioner KPUD Bangkalan Lahir di Bangkalan 11 Oktober 1978, beliau sebelumnya juga menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Bangkalan periode 2004-2009 dan 2009-2014 sebagai Ketua KPU Kab. Bangkalan samapai sekarang. Menjabat sebagai Koordinator Presidium tahun 2000-2001 di organisasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bangkalan, pernah menjabat sebagai Presidium tahun 2000-2001 di organisasi Dewan Kota Bangkalan, pernah menjabat sebagai Sekretaris tahun 2006-2009 di organisasi PC.GP.Ansor Bangkalan, pernah menjabat sebagai Sekretaris tahun 2013-1016 di organisasi KNPI Kabupaten Bangkalan.

c. Mujiburahman

Mujiburahman adalah salah satu warga asal desa galis kecamatan galis, yang berprofesi sebagai dosen di sekolah tinggi ilmu tarbiyah alibrohimi. Dalam skripsi ini, peneliti mewawancarai mujiburahman dalam kapasitas sebagai pemilih cerdas.

d. Suja'i

Suje'i adalah salah satu warga asal desa Kombangan kecamatan Geger, yang berprofesi sebagai kyai di lingkungannya.

e. Abdurahman

Adalah salah satu warga asal desa Padurungan kecamatana Tanah Merah, yang berprofesi sebagai tokoh pemuda di lingkungannya.

f. Buyung Pambudi

Adalah salah satu anggota Badan pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan, beliau mantan jurnalis JTV yang kemudian terpilih sebagai hukum dan sengketa pemilu.

B. Deskipsi Data Penelitian

Dengan merujuk pada panduan pernyataan diatas, maka dilakukan pengumpulan data penelitian. Penelitian awalnya menggali data awal tentang tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum kabupaten bangkalan. Hal itu dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Data seperti ini akan digunakann peneliti untuk melengkapii informasi yang hendak dijadikan detail informasi agar terdeskripsikan material maupun lainya. Selalin pihak KPUD Bangkalan, peneliti jugga mewawancarai beberapa informan dari kalangan masyarkat seperti tokoh masyarakat dan yang lain.

1. Pemilahan Sasaran Pemilih Berdasarkan Tipologi khalayak

Untuk mencapai tingkat partisipasi pemilih diatas lima pullu persen, KPUD Bangkalan memetakan tipologi pemilih, sehingga dengan pemetaan tersebut KPUD dapat mengambil langkah dan strategi khusus kepada masing-masing tipe pemilih.

"Dari berbagai tipologi pemilih, cara mendekati nya memang berbeda, contohnya kalau pemilih pemula, mereka identik dengan pengalaman pertama memilih karena baru saja mempunyai KTP, tentunya kita lebih memberikan pemahaman awall seperti apa itu pemilu apa itu demokrasi, tentunya dengan diselingi dengan simulasi-simulasi yang menyenangkan"

Mengenali Sasaran Komunikasi dalam hal ini pemilih adalah tergantung pada tujuan komunikasi tersebut, apakah agar komunikasi hanya sekedar mengetahui saja (metode informatif) atau agar komunikasi melakukan tindakan tertentu (metode persuasife atau instruktif). Maka dari itu mengenali karakter komunikan dalam hal ini pemilih menjadi hal yang sangat penting.

Berbagai cara pun akhirnya dipilih sebagai pendekatan terhadap pemilih yang sudah dikategorikan, dalam arti mendekekati pemilih dengan kecenderungan pemilih sendiri. Seperti halnya mendekati para pemilih pemula atau yang lebih dikenal sebagai generasi milenial.

"Ada pentas seni, grebek pasar, KPU goes to campus, banner, baleho. Ke tempat ibadah, selesai jum'atan kita selingi pemberitahuan. Ada juga lomba-lomba, seperti lomba jingle, lomba mascot"

Salah satu cara yang dilakukan yaitu menggelar pentas seni dan budaya dengan menampilkan berbagai aktraksi pencak silat tradisional,

³ Wawancara dengan informan Faisal Rahman Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPUD Bangkalan 18-Desember 2018
⁴ ibid

bertempat di halaman Glora Stadiun Bangkalan, Selasa (15/5) malam. Ketua komisioner KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar menyampaikan, pagelaran pentas seni dan budaya itu bertujuan sebagai salah satu sarana pendekatan KPU dalam melakukan sosialisasi sekaligus memberikan informasi dan edukasi terkait pelaksanaan pemilihan serentak 27 Juni 2018 kepada masyarakat.

yang "Sosialisasi kita lakukan sasarannya membangitkan kepada beberapa segmen-segmen tadi, agar kemudian lebih fokus dan pesan lebih tersampaikan maka kita membagi segmen itu dengan pendekatan yang berbeda. Kemudian pemilihan kepala daerah agar terkesan menggembirakan, sehingga mereka datang ke TPS dengan rasa gembira."5

Dengan cara penyesuaian terhadap pemilih KPUD kabupaten Bangkalan dengan Cara menddekati pemilih yang memiliki sikap apatis.Kita susah mendekati secara dini, karena angka golput itu bisa kita lihat setelah proses pemungutan selesai, jadi kita sebisa mungkin mendekati tempat yang kita anggap sebagai desa terpencil yang minim akses informasi

Bagi sebagaian masyarakat yang tetap memegang kultur dan pengetahuan yang lebih tentang agama Islam dibanding orang kebanyakan seperti Kyai atau Ustadz. Mereka akan lebih cenderung pada apa yang ustadz atau kyai itu katakan dan suruh. Pemerintah setempat meskipun ada namun, seolah-olah tidak ada kecuali yang berada pada pemerintahan itu adalah para ustadz atau kyai. Karena pemerintahan itu hanya sebatas formalitas.

٠

 $^{^{\}rm 5}$ Wawawncara dengan ketua KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar pada tanggal 19-Desember-2018

''Pimpinan itu penting, karena pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakat, sebagai orang awam kita juga harus mengerti pemimpin, kalau dipikir sepintas pemilu memang menyita waktum artinya kita harus antri di TPS menyita waktu kerja, waktu mencari pakan ternak dan lain-lain. Tetapi jika kita sadar bahwa memilih pemimpin itu penting maka meluangkan waktu lima menit hingga sepuluh menit ke TPS dapat menentukan nasib kita sendiri, artinya mungkin kita tetap jadi petani siapapun yang menjadi pemimpin tetapi, siapa tau pemimpin yang kita pilih dapat memberikan perubahan pada kita para petani atau saya yang guru ini,''⁶

Melihat konsidi sosial budaya yang ada di Kabupaten Bangkalan, maka KPUD kabupaten bangklana melakukan beberapa upaya untuk partisipasi masyarakat (pemilih) Pemilu 2014 di meningkatkan Kabupaten Bangkalan merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2015 bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan proses demokrasi yang dilaksanakan di daerah oleh KPUD. Bahan evaluasi ini akan menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi kedepan KPUD dalam rangka meningkatkanpartisipasi masyarakat/pemilih. Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam penelitian ini adalah; Pertama, faktorfaktor penyebab menurunnya tingkat partisipasi masyarakat/pemilih dalam pemilu maupun pemilukada di Kabupaten Bangkalan karena faktor sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD yang kurang efektif dan komuniatif, selain itu belum dilakukan secara menyeluruh. Sosialisasi yang baik akan menggugah kesadaran calon pemilih untuk menggunakan haknya dalam Pemilu. Kedua, faktor kandidat atau figur. Khususnya Pemilu untuk DPR dan DPRD kandidatnya lebih banyak dan lebih dekat dengan calon pemilih dibandingkan dengan kandidat dalam Pemilu Presiden. Sementara Pemilu Presiden hanya digerakkan oleh tim suksesnya saja. Ketiga, Pemilih sudah semakin cerdas dalam menentukan

⁶ Wawancara dengan Mujiburahman salah satu pemilih dari Desa Galis Kecamatan Galis pada tanggal 17-Desember 2018

siapa calon pemimpinnya, sehingga ketika terdapat calon yang kurang bisa diterima oleh masyarakat maka akan mempengaruhi antusiasme masyarakat dalam mengikuti pemilu/pemilukada. Faktor-faktor penyebab Golput selalu hadir dalam setiap Pemilu dan Pemilukada adalah Pertama, Problem Struktural, seperti adanya DPT ganda, adanya orang yang sudah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam DPT, dan adanya orang-orang yang belum tercatat dalam DPT. Kedua, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena terbentur dengan jam kerja. Ketiga, pilihan rasional, dimana para pemimpin dianggap tidak ada yang sesuai dengan yang diharapkan. Kempat, faktor pendidikan politik pemilih, bahwa semakin tinggi pemahaman pendidikan politik warga negara, biasanya angka golputnya semakin naik.

2. Tanamkan Pentingnya Kesadaran Bermokrasi Kepada Khalayak

Kesadaran akan pentingnya demokrasi di kabupaten bangkalan memang terbilang masih minim, hal itu ditandai dengan tiangkat partisipasii pemilih dari tahun 2012 dan tahun 2018 yang hanya berkisar diangka 64 dan 65 persen. Artinya angka golput atau tidak memilih masih relative cukup tinggi di Kabupaten Bangkalan.

Oleh sebab itu, KPUD Kabupaten bangkalan terus berupaya melakukan penyadaran akan penting berdemokrasi di Kabupaten Bangkalan dengan bebrbagai cara seperti lebih mengutamakan sosialisasi secara berkala dan persuasive.

"Maka dari itu, ini menjadi tugas kita bersama, artinya kesadaran politik di kabupaten bangkalan memang masih kurang maka dari itu semua

pihak harus benar-benar menyadari jika setiap momen demokrasi itu amat sangat penting''⁷

Sepertii paparan di sub bab sebelumnya, masyarakat Madura secara umum khusunya kabupaten bangkalan masih memegang nilai dan ajajaran para sesepuh tentang sikap takdim kepada orang tua dan guru. Keberadaan Pemerintah dalam hal ini kepada daerah berada di posisi ketiga dalam strata social. Atas dasar itu langkah yang dilakukan oleh KPUD Bangkalan yang menjadi titik point paling penting ialah meningkatkan kualitas pendidikan pemilih.

Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal.Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu pemilih adalah setiap warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika pemilu/pemilihan dilaksanakan.

Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta warganegara Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai pemilih. Warganegara yang dalam rentang waktu lima tahun kemudian menjadi pemilih disebut sebagai pra-pemilih. Pendidikan Pemilih, dengan demikian, adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dengan informan Faisal Rahman Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPUD Bangkalan 18-Desember 2018

kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian.

Dalam pendidikan pemilih, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Pendidikan pemilih penting karena beberapa alasan:

- ✓ Membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik.

 Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana pemilih seharusnya bertindak.
- ✓ Meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.
- ✓ Meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Angka kecurangan pemilu, konflik pemilu, mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih sehingga menghasilkan pemenang pemilu yang berkualitas.
- ✓ Memperkuat sistem demokrasi. Pendidikan pemilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemilih dalam sistem demokrasi. Ini akan memperkokoh advokasi warganegara terhadap sistem demokrasi dibandingkan sistem politik lain.

"Demokrasi ini lahir kan tidak serta merta lahir layaknya orang melahirkan, karena demokrasi lahir dengan diringi budaya dan kebiasaan masyarakat. Di bangkalan sendiri, budaya patriaki kan luar biasa, sikap tunduk, sungkan terhadap kiai, sesepuh masih sangat kental sehingga seringnya terjadi pemilih datang ke TPS karena tekanan atau titipan dari sesepuh. Maka dari itu, ini menjadi tugas kita bersama, artinya kesadaran

politik di kabupaten bangkalan memang masih kurang maka dari itu semua pihak harus benar-benar menyadari jika setiap momen demokrasi itu amat sangat penting''.8

Kurang sadarnya masyarakat bangkalan akan pentingnya demmokrasi dalam hal ini pemilihan kepala daerah memang menjadi persoalan yang sampai saat ini belum bisa sepenuhnya diselesaikan, perlu perhatian dan kerjasama beberapa elemen masyarakat untuk mewujudkan masyarakat bangkalan yang sadar akan pentingnya pendidikan politik.

Dewasa ini, banyak *stigma negative* yang berkembang terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan politik. Politik dimaknai secara delusional oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dikarenakan elite politik itu sendiri. Sesungguhnya dalam sebuah politik, terdapat kajian–kajian penting mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Mengutip dari Aristoteles, politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Mayoritas masyarakat mengartikan politik sebagai segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Seyogya nya, ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, elite parpol dan partai politik serta masyarakat agar hal tersebut tidak salah kaprah.

Partai politik di kabupaten bangkalan yang seharusnya memiliki andil besar dalam pendidikan politik harus mengambil langkah agar dapat mengubah *image* miring yang ada di Kabupaten Bangkalan

-

⁸ Wawancara dengan Faisal Rahman divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM (tanggal18 desember 2018)

tersebut. Pendidikan politik harusnya dimaknai sebagai upaya untuk membangun pondasi bermasyarakat maupun bernegara di bumi tercinta Indonesia ini. Pengembangan pendidikan politik harus dibangun agar pemberdayaan dan penguatan generasi muda supaya memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun kesadaran berdemokrasi di kota salak.

Pada akhirnya, semua pihak harus turut serta di dalam pendidikan politik agar masyarakat mau dan peduli terhadap kemajuan bangsa ini. Apabila tidak dimulai dari sekarang, hal ini dapat menyebabkan sikap pesimistis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Kaum muda sebagai generasi penerus harus bangkit dan sadar bahwa pendidikan politik merupakan kunci dari kesejahteraan dan kejayaan Indonesia di masa yang akan datang.

Dengan kondisi demikian, pemilih lebih bersifat apatis dan acuh terhadap setiap moment pesta demokrasi di Kabupaten Bangkalan.

"Memang jika kita perhatikan ada juga anggapan orang seperti itu, tapi meskipun orang-orang desa itu mempunyai kesibukan dalam artian keseharian mereka ngarit atau layaknya orang petani. Namun mereka tetap beranggapan bahwa memilih pemimpin itu sifatnya wajib karna dalam agama pun dianjurkan bahwa memilih pemimpin itu wajib, meskipun ada sebagian orang mengatakan bahwa siapapun yang dipilih sama saja begitu, sehingga pada akhirnya mereka tidak memilih dan

beranggapan lebih baik bekerja saja daripada buang-buang waktu saja,''9

3. Mengutamakan Kelompok Perempuan Dalam Sosialisasi

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Namun perempuan dalam perspektif kepemiluan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis atau perspektif gender. Pemilih perempuan menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih perempuan berimbang dengan pemilih lakilaki namun kapasitasnya masih terbatas dibandingkan laki-laki. Kedua, pemilih perempuan rentan dimobilisasi baik ketika pemilu maupun di luar pemilu. Ketiga, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki. Keempat, pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domestik sehingga urusan publik terabaikan padahal banyak menyangkut kepentingan kaum perempuan.

Menurut Faisal Rahman divisi sosialisasi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPUD bangkalan, pemilih perempuan merupakan pemilih dengan karakter yang rentan, dalam artian, rentan dipengaruhi, rentan dan diintimidasi, sehingga pihaknya lebih mengutamakan penguatan karakter ketika menyampaikan sosialisasi kepada pemilih perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹ Wawancara dengan abdurahman salah satu tokoh pemuda dari desa padurungan kecamatan tanah merah (pada 16 desember 2018)

''Kalau perempuan kan pemilih yang rentang, rentan dipengaruhi, rentan terpengaruh, maka dari itu kita lebih memberikan pemahaman tentang pemilih yang berkarakter, dengan menguatkan pemahaman peran perempuan di kancah politik. Tentang keterwakilan perempuan di pesta demokrasi lima tahunan itu.''¹⁰

Dilain sisi, pemilih perempuan adalah corong yang terbilang cukup efektif sebagai media sosialisasi, sebab ibu-ibu ini cara beradaptasi dengan lingkungan lebih sering. organisasi perempuan juga penting diberi pemahaman. Karena menurutnya perempuan bisa menyampaikan informasi dari mulut ke mulut dilingkungan sekitarnya terutama yang terorganisir dengan lebih cepat.

"jadi kita berikan pemahaman kepada ibu-ibu agar yang digosipkan itu seputar pemilu, jadi dengan begitu, pesan yang kita sampaikan cepat tersebar,"

4. KPUD Bangkalan Pastikan Netralitas Sebagai Penyelenggara

Penyelenggara pemilu, termasuk pemilihan umum kepala daerah, harus orang yang netral, bukan anggota partai politik atau mantan anggota parpol. Persyaratan itu penting untuk menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan KPU daerah.

Jika merujuk pada undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Netralitas merupakan hal penting yang harus dimiliki penyelenggara pilkada. Netral berarti tidak memihak kepada salah satu kontestan. Di sejumlah agenda -misalnya pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah PPK atau pun PPS-,

-

Wawancara dengan Faisal Rahman divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM (tanggal18 desember 2018)

ketua KPU kabupaten/ kota menginstruksikan agar penyelenggara benar-benar memegang teguh prinsip netralitas. mencoreng lembaga penyelenggara.

Bagi penyelenggara pilkada, setidaknya ada dua hal yang termasuk pelanggaran berat, yakni: a) menghilangkan hak pilih warga; b) mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih kandidat tertentu. Kedua hal tersebut diusahakan untuk dihindari seorang penyelenggara pilkada atau pemilu. Jika pelanggaran di atas dilakukan, karier penyelenggara tersebut akan "tamat". Namanya akan masuk "daftar hitam" di lembaga penyelenggara kepemiluan. Ia tidak akan diterima jika suatu hari kemudian ia ikut mendaftar sebagai penyelenggara.

KPUD juga telah membuktikan netralitas dirinya sebagai penyelenggara pada pemilihan 2012, meski pada saat itu antusiasme masyarakat sedikit menurun akibat beberapa insiden massa salah satu paslon yang menduduki kantor KPUD.

Dalam upaya menjaga netralitas, KPUD bangkalan memang sempat ditengarai tidak netral saat PILKADA 2012 lalu, pencoretan pasangan Imam Buchori-Zainal Alim menjadi salah satu pemicunya. Masssa pendukung pasangan kiai imam kemudian menduduki kantor KPUD hampir selama sepekan. Pasca itu kepercayaan masyarakat sebagai pemilih sedikit demi-demisedikit meras tidak percaya kepada KPUD sebagai penyelenggara.

Namun isu ketidaknetralan itu kemudian ditepis dengan tegas oleh KPUD. Sebab pencoretan pasangan Imam Buchori-Zainal Alim

tersebut merupakan ketuputusan mahkamah konstitusi yang didasarkan pada ketidak aktifan partai pengusung di pemilu sebelumnya.

"sejauh ini, kinerja KPUD Bangkalan tetap menjaga netralitas sebagai penyelenggara, ketidakberpihakannya dapat kita lihat dari adil dalam memberi porsi kampanye kepada paslon, porsi dan penempatan Alat Peraga Kampaye yang sesuai dengan prosedur yang ada".



¹¹ Wawancara dengan buyung pambudi salah satu anggota komisioner KPUD bangkalan (wawancara pada 20 desember 2018)

BAB IV

INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

A. Analisis Data

Temuan penelitian berupa data-data dari lapangan yang diperoleh dari peneliti kuanlitatif ini berupa data yang bersifat deskriptif. Hal ini sangat diperlukan sebagai hasil pertimbangan antara hasil temuan penelitian di lapangan dengan teori yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Setelah penelitian melakukan penyajian data pada bab sebelumnya yang telah disajikan pada sub bab penyajian data, penelitian menemukan beberapa temuan terkait dengan strategi komunikasi KPUD Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan.

Peneliti memfokuskan pada tahap strategi komunikasi KPUD Bangkalan merujuk pada hasil penyajian data yang peneliti sajikan pada sub bab sebelumnya secara mendetail dan sistematis dapat peneliti sampaikan temuan-temuan apa asaja yang diperoleh dari hasil penyajian tersebut diantaranya adalah:

1. Pemetaan Pengetahuan Pemilih Melalui Pembagian Tipologi Khalayak

Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menjadi prioroitas ikhtiar pendidikan pemilih. Ia menjadi prioritas karna posisi strategis kelompok sosial itu dalam struktur pemilih dan adanya persoalan-persoalan khusus yang perlu mendaopat perhatian dibandingkan kelompok sosial

lainya. Secara umum terdapat 4 (empat) kluster pemilih yang menjadi kelompok sasaran, yaitu:

a. Kelompok Pemilih Strategis

Kelompok pemilih strategis adalah kelompok pemilih yang karena besaran ataupun posisis dalam struktur pemilih berada dalam posissi strategis. Kluster ini terbagi dalam pra-pemilih, pemula, perempuan, marginal dan penyandang stabilitas, dan agamawan.

b. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada. Denagan siklus pemilihan di Indonesia yang gelar setiap lima rtahun sekali maka kisaran usia pemilih ini adalah 12-21 tahun. mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA.

Pemilih pemula menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih pemula dalam setiap pilkada cukup besar. Kedua, mereka adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pertama kalinya memberikan suara dalam pilkada sehingga perlu diberi arahan yang baik agar memiliki pemahaman yang baik piula terhadap demokrasi. Ketiga, mereka adalah calon pemimpin masa depan sehingga dengan menggali dan mengetahui pandangan mereka tentang demokrasi, kita dapat memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal di masa depan.

c. Perempuan

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Namun perempuan dalam perspektif pilkada dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis atau perspektif gender. Pemilih perempuan rentan dimobilisasi baik ketika pilkada maupun di luar pilkada.

Pemilih perempuan menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih perempuan berimbang dengan pemilih laki-laki namun kapasitasnya masih terbatas dibandingkan laki-laki. Kedua, pemilih perempuan rentan dimobilisasi baik ketika pilkada maupun di luar pilkada. Ketiga, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki. Keempaat, pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domistik sehingga urusan publik terabaikan padahal banyak menyangkut kepentingan kaum perempuan.

d. Kelompok Marginal Dan Penyandang Disabilitas

Kelompok pemilih marjinal dan penyandang disabilitas adalah suatu kelompok yang terasimilasi tidak sempurna dalam masyarakat. Kelompok marginal tercipta sebagai imbas dari perubahan structural di masyarakat yang menghasilkan residu seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan. Pembangunan yang tidak adil, bias kelas dan geografis, dan sebagainya menjadi penyebab lahirnya kelompok marginal. Keadaan pada kelompok marginal dan penyandang disabilitas kemudian membawa dampak pada kesadaran politik yang mereka miliki.

Kelompok tersebut menjadi sasaran pendidikan pemilih karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan warganegara pada umumnya. Mereka juga memiliki hak untuk paham tentang berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan baik. Jumlah mereka tidak sedikit menjadi faktor lain yang meletakkan pentingnya kelompok ini sebagai sasaran pendidikan politik. Kelompok ini rentan dimobilisasi dan dikomodifikasi dalam berbagai peristiwa politik. Maka dari itu KPUD memberikan sosialisasi dengan cara yang lebih persuasif dan berkalala.

"Dari berbagai tipologi pemilih, cara mendekati nya memang berbeda, contohnya kalau pemilih pemula, mereka identik dengan pengalaman pertama memilih karena baru saja mempunyai KTP, tentunya kita lebih memberikan pemahaman awall seperti apa itu pemilu apa itu demokrasi, tentunya dengan diselingi dengan simulasi-simulasi yang menyenangkan"¹

2. Pemilihan Media Yang lebih Bersifat Konvensional

Penggunaan Teknologi Informasi Hampir tidak ada masyarakat yang tidak bersentuhan sama sekali dengan teknologi informasi. Pada saat bersamaan, teknologi informasi juga berkembang dengan cepat. Situasi tersebut perlu direspon dengan baik untuk pendidikan pemilih. Teknologi informasi memiliki daya jangkau yang sangat luas dan akses real time.

Internet, gadget, sistem aplikasi, teknologi visual, audio-visual dan sebagainya saat ini begitu dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Melalui itu berbagi informasi berupa data, suara, gambar dan video dapat diperoleh dengan cepat, mudah dan murah. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh kehadiran teknologi informasi.

¹ Wawancara dengan Faisal Rahman divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM (tanggal 18 desember 2018)

Pendidikan pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi kontemporer akan mendorong partisipasi. Pemilih akan terdorong berkontribusi dan memberikan umpan balik atas topik atau masalah yang sedang menjadi pembahasan bersama, atas kesadaran sendiri. Pendidikan pemilih juga menjadi lebih transparan dan dapat dijangkau oleh semua pihak dan sepanjang waktu. Konektivitas dan jejaring antar sesama pengguna yang terlibat dalam pendidikan pemilih juga dapat tercipta dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi informasi kontemporer untuk pendidikan pemilih dapat mendorong suatu advokasi publik atas suatu persoalan. Setiap orang bebas menyuarakan ide atau kepentingannya sekaligus meminta dukungan.

Namun demikian, pemamnfaatan teknologi tak selamanya dapat dirasakan jika khalyak belum bisa menerima kecanggihan teknologi secara utuh, di Kabupaten Bangkalan misalnya, setiap pesan lebih bermakna dan efektif tersampaikan jika melalui tatap muka. Hal itu lebih cenderung berhasil mengingat budaya dan adat masyrakat yang masih dibilang baru berkembang kearah modern.

Meski demikian dalam hal ini KPUD bangkalan tetap menjadikan media massa sebagai media utama dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya berdemokrasi.

a. Pemanfaatan Media Massa

Meskipun sifatnya sangat konvensional, media massa masih menjadi salah satu wahana yang efektif sebagai penyampai informasi kepada pemilih. Ia mampu menjangkau pelbagai lapisan masyarakat secara massif tanpa terkecuali. Media massa berperan penting dalam melaksanakan pendidikan pemilih guna mencerdasan warga negara dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi.

Secara umum, media massa dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak berupa koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Sedangkan media eletronik adalah televisi, film, video, dan radio.

Media massa dengan fungsi persuasif mampu membentuk kesadaran pemilih. Ia mampu mempengaruhi opini pemilih atas berbagai persoalan yang berkembang. Media massa dapat mengubah budaya politik dan partisipasi politik pemilih.

b. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan menjadi salah satu elemen strategis dalam melakukan pendidikan pemilih. Pertama, lembaga pendidikan tersebar di seluruh daerah pararel dengan keberadaan KPU. Kedua, audiens pemilih di lembaga pendidikan itu solid. Ketiga, jumlah pemilih di lembaga pendidikan sangat besar, yaitu pra-pemilih dan pemilih pemula.

Pendidikan pemilih melalui lembaga pendidikan menjadi awal yang baik untuk membentuk sikap dan perilaku pemilih. Ia dapat menjadi fondasi dan sekaligus penyaring atas berbagai hal yang sampai kepada pemilih. Nilai yang ditanamkan akan membentuk karakter pemilih ke depan.

Pada lembaga pendidikan, pendidikan pemilih dapat dimasukkan dalam mata pelajaran yang relevan atau berbagai kegiatan di lembaga pendidikan seperti upacara bendera dan pemilihan ketua kelas, OSIS, atau lembaga perwakilan mahasiswa.

c. Pemanfaatan Aktifitas Sosial Budaya

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bertipe paguyuban dalam pola interaksinya. Kehidupan masyarakat kental dengan pelbagai aktivitas kegiatan sosial budaya. Aktivitas sosial budaya itu dilaksanakan secara massal. Kegiatan itu ada yang terpilah dalam segmentasi tertentu sampai pada melibatkan semua kalangan. Bentuk aktivitas sosial budaya di antaranya adalah pawai, perlombaan, rembug desa, kegiatan arisan, PKK, pertunjukan seni, kepemudaan, keagamaan, dan sebagainya.

d. Komunitas Hobby

Meskipun hobby yang digeluti sangat tidak berkaitan dengan dunia politik atau dunia kepemiluan, namun sama sekali tidak menutup kemungkinan bagi program pendidikan pemilih masuk ke dalam dunia mereka. Pendekatan yang digunakan memang tidak bisa serta merta seperti pendekatan yang digunakan oleh program pendidikan pemilih yang lain.

Salah satu karakteristik dari komunitas hobby adalah kegiatannya a-politis, bahkan tidak jarang mereka alergi kepada kegiatan-kegiatan politik. Oleh karenanya pendekatan terhadap mereka tidak bisa dengan

mudah membawa simbol-simbol institusi politik (Partai politik, DPR, Presiden) ke hadapan mereka. Karena justru bisa menimbulkan antipati dari mereka.

Namun dengan pendekatan yang tepat, komunitas hobby bisa menjadi wahana yang tepat bagi proses pendidikan politik di negeri ini. Karena komunitas hobby ini memiliki karakteristik ikatan kelompok yang kuat antar anggotanya. Sehingga apabila satu dua orang sudah mengerti tentang tujuan pendidikan pemilih, maka ia akan mempengaruhi anggota lainnya. Pendidikan pemilih melalui komunitas hobby adalah kegiatan a-politis yang berdampak politis.

e. Rumah Pintar Pemilu

Pendidikan pemilih dapat dilakukan pula dengan membuat satu tempat dengan peruntukan khusus, yang kita sebut dengan "Rumah Pintar Pemilu", atau sebutan lain. Bentuknya dapat berupa pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan pendidikan pemilih.

Pada rumah pintar pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi disediakan di rumah pintar pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pamer, ruang simulasi, dan ruang diskusi. Pada fungsi yang

lebih luas, konsep rumah pintar pemilu dapat difungsikan menjadi semacam museum pemilu.

f. Relawan Demokrasi

Pendidikan pemilih dapat dilakukan pula dengan menggalang relawan demokrasi. Konsep ini dapat disebut dengan berbagai istilah seperti relawan pemilu, pioneer pemilu atau duta pemilu. Inti gagasan demokrasi adalah kesukarelaan relawan dari pemilih mencerdaskan pemilih dan terlibat dalam proses demokratisasi. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda pendidikan pemilih. Kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat digalang sebagai relawan. Dengan demikian, strategi ini merupakan suatu gerakan sosial yang bersifat masif.

g. Kreasi Lain

Strategi pendidikan pemilih melalui kreasi lain adalah berbagai program kegiatan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai variasi tantangan. Kreasi lain ini dapat diinisiasi karena kombinasi tantangan yang muncul sebagai akibat dinamika masyarakat, kondisi geografis/alam, atau adanya inovasi teknologi. Persoalan kemampuan sumberdaya dan anggaran juga dapat menjadi pertimbangan satu strategi pendidikan pemilih melalui kreasi lain.

Pengiriman bahan pendidikan pemilih, mobil keliling, becak keliling, pemasangan bahan pendidikan pemilih di tempat-tempat strategis adalah beberapa strategi pendidikan pemilih yang termasuk kategori melalui kreasi lain.

''Ada pentas seni, grebek pasar, kpu goes to campus, banner, baleho. Ke tempat ibadah, selesai jum'atan kita selingi pemberitahuan. Ada juga lombalomba, lomba jingle, lomba mascot.''²

3. KPUD Junjung Netralitas Sebagai Penyelengara

Dalam banyak kasus, pemicu konflik pada tahapan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia adalah faktor integritas dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan maupun ketidakpuasan peserta pemilu terhadap lembaga penyelenggara.

Untuk menghindari kondisi tersebut, terhadap menipisnya rasa loyalitas, dedikasi dan kinerja penyelenggara dalam pelaksanaan tugas, serta untuk menjaga kondisi terdegradasinya rasa kedisiplinan dan kepatuhan unit-unit satuan kerja penyelenggara dalam melaksanakan peran serta tanggung jawab kerjanya, diperlukan suatu ketegasan dan sikap arif dari setiap aparatur penyelenggara pemilu untuk bersikap netral.

Asas netralitas penyelenggara pemilu tersebut menjadi sangat penting terutama dikaitkan dengan dalih-dalih hukum yang menegaskan afiliasi politik bagi para penyelenggara pemilu. Tidak mengherankan, bahwa netralitas penyelenggara pemilu diperlukan, tanpa harus menghilangkan

_

² Wawancara dengan Faisal Rahman divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM (tanggal18 desember 2018)

hak-hak politiknya sebagai warga negara. Bilamana norma atau hukum yang mewajibkan netralitas bagi penyelenggara pemilu dikaitkan pada penerapan faktualnya, maka akan ditemukan suatu indikator menarik.

Artinya, semua gagasan baik yang tertuang secara normative dalam undang-undang ataupun gagasan keberpihakan penyelenggara selalu menjadi sorotan baik di mata public maupun pengawas pemilu. Dalam hal inni KPUD Kabupaten Bangkalan sudah bersikap netral baik dari sisi aturan main perundang-undangan atau bahkan secara keberpihakan perorangan.

Melihat pengalaman Peilkada 2012, para kandidat calon bupati dan wakil bupati berjuang secara individu meraih suara sebanyak-banyaknya. Hal ini membuat para kandidat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara, termasuk dalam hal pendanaan kampanye serta manuver politik. Tidak jarang terjadi persaingan antar caleg dan berpotensi memicu konflik, baik antar caleg satu partai maupun caleg beda partai. Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpim negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional.

Dengan demikian, pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD bangkalan bukan hanya menjadi tanggung jawab badan pengawasan pemilu atau apart yang berwenang, akan tetapi pengawasan terrhadap kinerja KPUD menjadi tugas bersama masyarakat.

Sebab, jika diibaratkan pemilihan pemimpin sama halny adengan permainan sepakbola, kedua tim bertanding secara fair play dipimpin oleh oseorang wasit. Tetntunya supporter dalam hal ini masyarakat dapat menilai secara langsung pengadil di dalam lapangan.

4. Kesadaran Politik Masyarakat Yang Rendah Sebagai Penghambat Kinerja KPUD

Tradisi carok di dalam masyarakat Madura sebagai upaya penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Apakah dengan melukai seseorang dengan luka berat sampai pada bentuk pembunuhan sangat terkait erat dengan hasrat dan rasa menjaga kehormatan dan harga diri. Orang Madura akan melakukan carok bila harga diri dan kehormatannya merasa terusik, diganggu atau dilukai. Rasa terusik bila itu berkembang pada perasaan malu, atau dalam bahasa Maduranya maloh atau todus akan bermuara pada tindakan carok. Bahasa Madura yang popular menegaskan dalam konteks ini adalah 'ango'an pote tolang etembang pote matah', artinya lebih baik putih tulang dibandingkan putih mata. 'Hidup itu tidak ada maknanya kalau kehilangan harga diri''.

Masyarakat Madura seorang yang memiliki pengetahuan yang lebih tentang agama Islam dibanding orang kebanyakan seperti Kyai atau Ustadz. Mereka akan lebih cenderung pada apa yang ustadz atau kyai itu katakan dan suruh. Pemerintah setempat meskipun ada namun, seolah-olah tidak ada

kecuali yang berada pada pemerintahan itu adalah para ustadz atau kyai. Karena pemerintahan itu hanya sebatas formalitas.

Dengan begitu, masyarakat Madura seperti halnya Bangkalan menganggap Pemerintah adalah sebagai urutan ketiga setelah guru dan orang tua. Dengan budaya semacam itu, proses pemilihan kepala daerah, legisltif maupun presiden tak lebih seperti perayaan seremonial belaka bagi masyarakat. Dengan kondisi demikian Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara mempunyai tugas yang cukup kompleks dalam menyakinkan dan memberi pemahaman kepada masyarakt tentang penting demokrasi dan pemilihan umum.

Dengan begitu, kinerja Komisi pemilihan umum daerah menjadi bagian paling ungen dalam setiap momen pergantian pemimpin di daerah. Dari paparan data yang telah disajikan sebelumnya, KPUD Bangkalan berusaha memilah tipollogi pemilih sesuai dengan perilakunya, terlebih KPUD Bangkalan berusaha menselaraskan setiap sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Maka dari itu langkah yang dilakukan sialah memetakan segmentasi dalam masyarakat. Segmentasi adalah pembilahan social yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat terpilah-pilah kepada kelompok-kelompok pemilih yang homogeny yang potensial, hal itu tentu berdasarkan database kependudukan atau daftar pemilih tetap.

Setiap segmen pemiilih memiliki kebutuhan, karakteristik, perilaku, yang berbeda. Oleh karena itu pendekatan pendidikan pemilih yang dilakukan kepada masing-masing kelompok tersebut harus berbeda dengan karakter dari setiap segmen.

Setelah itu, penguatan karakter pemilih akan diarahkan kepada pemilih. Berorientasi kepada pemilih artinya kepentingan pemilih sebagai warganegara menjadi pusat penguatan. Pemilih harus dikuatkan di hadapan pemerintah dan elemen non-demokrasi lainya.

"Di bangkalan sendiri, budaya patriaki kan luar biasa, sikap tunduk, sungkan terhadap kiai, sesepuh masih sangat kental sehingga seringnya terjadi pemilih datang ke TPS karena tekanan atau titipan dari sesepuh. Maka dari itu, ini menjadi tugas kita bersama, artinya kesadaran politik di kabupaten bangkalan memang masih kurang maka dari itu semua pihak harus benar-benar menyadari jika setiap momen demokrasi itu amat sangat penting"

strategi KPUD Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi pemilih ialah Minimnya kesadaran politik yang ada di Kabupaten Bangkalan. Hal itu diPerilaku masyarakat termasuk didalamnya perilaku politik dengan sendirinya berkembang didalam dan dipengaruhi oleh kompleksitas nilainilai budaya yang ada didalam masyarakat tersebut. Pengaruh ini dapat dilihat dari penerapan nilai-nilai tradisi dalam sistem kebudayaan tersebut yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama didalam struktur masyarakat yang semua anggotanya tercakup di dalam kekuatan sosial yang sama dimana komunitas atau masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan.

" perilaku pemilih tidak bisa dipungkiri tetap terpengaruh oleh budaya dan adat kebisaan (lokal wisdom). Sehingga menurut kami kegembiraan itu memang tercampur dengan adat dan istiadat yang ada di kabupaten bangkalan sendiri."

Perilaku pemilih memang kadang kala dipengaruhi oleh budaya dan kultiur yang ada di daerahnya, seperti pada sub bab yang dikemukakan sebelumnya, perilaku pemilih di bangkalan merujuk kepada sebera penting

-

³ Wawancara dengan faisal rahman divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM (tanggal18 desember 2018)

⁴ Wawancara dengan ketua KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar (pada 17 desember 2018)

nya pemimpin daerah bagi mereka, karena bagi masyarakat Madura secara umum *ponggaba* atau *ratoh* berada diurutan ketiga setelah orang tua dan guru.

B. Kofirmasi Dengan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori diantaranya teori perencanaan strategi model John Middeleton untuk menganalisis hasil temuan penelitian melalui teori diatas. Hasil dari temuan peneliti yang sudah ditetapkan sebelumnya dicari relevansinya dengan teori-teori yang ada, sehingga ditemukan sebuah jawaban yang relevan dengan teori.

Berdasarkan teori tersebut, KPUD Bangkalan Dari hasil penelitian,strategi komunikasi KPUD bangkalan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Perencanaan komunikasi yang dimaksud adalah untuk memperhatikan dan menentukan komponen-komponen komunikasi serta meminimalisir faktor-faktor penghambat pada setiap komponen tersebut dalam hal untuk mewujudkan tujuan dari sosialisasi ppeningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Bangkalan. Selain dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam konteks sosialisasi pemilihan kepala daerah lebih jauh lagi sosialisasi dan persuasive ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran politik di Kabupaten Bangkalan.

Secara garis besar penelitian ini menggunakan penerapan strategi komunikasi model John Middleton. Artinya sebelum merancang strategi dalam menigkatkan partisipasi pemilih, KPUD harus menetapkan database atau yang lumrah disebut dengan daftar pemilih tetap.

Di Tahun 2012 dengan jumlah Daftar pemilih tetap sebanyak 888.928 suara, Sementara pada Tahun 2018, jumlah daftar pemilih tetap memang terbilang menurun, alasanya tentu tingkat populasi masyarakat yang berkurang berdasarkan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. sebanyak 859.067 pemilih tercatat dalam data KPUD Kabupaten Bangkalan. Jika merujuk pada model komunikasi john middleton. Promosi atau kampanye haruslah berdasarkan kepada database assasement. Artinya promosi atau kampanye yang dilakukan tidak bisa dilakukan kepada khalayak umum dalam arti di ruang lingkupi oleh teritori wilayah.

Setelah menentapkan database atau DPT. KPUD kemudian mulai memetakan segmentasi pemilih menurut pada tipologi dan karakteristik pemilih, dengan begitu KPUD bangkalan dapat menentukan cara yang akan dipilih dalam menentukan model pendekatan kepada pemilih. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih, secara operasional dapat ditelusuri dari beberapa kondisi di sekitar "golput" dan memadukannya untuk mencari titik temu secara operasional, yaitu:

Kondisi yang menjadi masalah / penyebab kurangnya atau rendahnya partisipasi pemilih.Lini partisipasi pada segmentasi pemilih rentan : pemilih pemula, *swing voters*, pemilih usia lanjut, mereka yang kurang akses informasi, kaum "golput".

Stakeholders aktif, yakni "siapa yang berkepentingan dengan partisipasi pemilih". Ketiga variabel di atas perlu ditelusuri sambil mengenali secara tepat:

- a). Karakter pemilih
- b. Nilai-nilai budaya lokal
- c). Mendekatkan pemilih pada isu kemanfaatan pemilu

Ketiganya dimaksudkan agar terbentuk konstruksi berpikir pada masyarakat bahwa pemeranannya dengan ikut pemilu secara aktif (sebagai pemilih) adalah memang kepentingan dan kebutuhannya (bukan sekedar hak atau wajib). Pertama mencari penyebab kurang/ rendahnya partisipasi. Dari penelitian penulis di atas, beberapa faktor di sekitar rendahnya apresiasi terhadap pemilu yang kemudian merembes kepada menjauhnya dari urusan pemilu, adalah, pragmatisme masyarakat yang kemudian mengukur aktivitas pemilu dan aktivitas elektoral peserta pemilu dari sudut pandang kepentingan mereka (yang kerap bernilai pragmatis). Kedua, bertolak dari rendahnya apresiasi terhadap pemilu. Ini adalah persepsi negatif pemilih terhadap "apa dan siapa yang akan dipilih". Ketiga, mendekatkan jarak politik dan ikatan sosial pemilih dengan peserta pemilu. Faktor informasi (misalnya kelangkaan informasi tentang pemilu) tidak serta merta menjauhkan masyarakat dari keputusannya untuk ikut pemilu, namun berada pada dataran pemahaman materi pemilu saja. Dari sisi partisipasi pemilu, tidak mengkhawatirkan, justru dari sisi kepentingan peserta pemilu yang mengkhawatirkan, karena kelangkaan informasi pemilu bisa membiaskan pemilih seperti salah pilih dsb.

Ketiga poin di atas sekaligus bisa mengikis persepsi publik terhadap isu pemilu (bagian dari isu politik), bahwa urusan pemilu yang dipersepsi sebagai urusan elit (bukan urusan rakyat) menjadi bagian dari kehidupan rakyat. Sayangnya, isu politik masih dianggap "horor", sulit, tidak terjangkau, tingkat tinggi, penuh tipu-tipu. Dan itu urusan elit. Nah. Mengubah persepsi ini yang semestinya menjadi isu utama pendidikan politik dan pendidikan pemilih.

Hal itu kemudian menjadi ssalah comeen isu yang menjadi dasar dari perumusan strategi KPUD kabupaten bangkalan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Jika merujuk pada langkah-langkah strategi komunikasi model john middlethon, Pengumpulan data base line dan need assessment. Pengumpulan data base line menjadi hal yanng sangat penting dalam perencanaan komunikasi. Setiap aspek perencanaan akan mengacu pada data base line atau penelitian. Kegiatan penelitian ini akan dihasilkan data primer dan data sekunder. Dalam hal ini KPUD kabupaten bangkalan sudah melakukan proses data base line dan need assessment dalam bentuk pendataan daftar pemilh tetap (DPT).

Setelah itu, Penentuan tujuan bisa dilakukan dengan memperhatikan masalah yang dihadapi dan akhirnya merumuskan bagaimana keadaan masalah tersebut setelah program dilaksanakan. Penentuan tujuan harus spesifik supaya dengan jelas dan komprehensif bisa dilaksanakan. Kemudian objective dari sebuah program haruslah terukur apalagi saat dilakukan evaluasi. Kemudian objective harus bisa dijangkau dengan sumberdaya yang ada. Objective kemudian harus realistis sesuai dengan waktu yang tersedia

dan budget yang ada beserta sumber daya lain, dengan kata lain francangan awal formulasi strategi dapat dilakukan setelah perumusan selesai.

Strategi adalah cara yang disusun seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai objective yang ditentukan. Strategi ini merupakan dasar dari taktik yang akan dibuat dalam setiap keadaan di lapangan.

Analisis dan segmentasi khalayak juga harus dilaksanakan dengan menentukan siapa target sasaran program yang sedang dijalankan. Analisis ini sangat penting karena bentuk perencanaan akan sangat bergantung pada tipe publik yang dihadapi. Pemrogram komunikasi setidaknya harus memilah publik menjadi tiga kelompok. Pertama, Latent Public yaitu kelompok yang menghadapi masalah dan tetapi tidak mempunyai perhatian lebih. Kedua, adalah aware public, yaitu kelompok yang bertanggung jawab terhadap masalah. Sedangkan yang terakhir adalah active public yaitu kelompok yang melakukan tindakan terhadap masalah, seperti memetakan tipologi pemilih melalui kecenderungan khalayak.

Pemilihan media sangat penting dilakukan dengan memperhatikan tiap tahap berikut ini.Pertama mendaftar media yang sudah ada. Semua media yang mungkin mendukung program komunikasi di data dan bila perlu dikelompokkan menurut keperluan program. Setelah pendataan dilakukan evaluasi, media mana saja yang sesuai dari segi waktu, jangkauan segment, biaya, dan efektifitas.

Pendesainan dan pengemasan pesan lantas dilakukan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, segment dan berpanduan pada teori-teori dan keilmuan yang ada.

perancangan struktur manajerial beserta job deskripsi masingmasing. Mekanisme-mekanisme perlu disiapkan dalam hal ini misal, bagaimana alur dana berjalan. Selain itu bagaimana koordinasi dilakukan dilapangan, dan sebagainya.

Setelah perumusan strategi beserta anlaisis dilakukan KPUD Kabupaten bangalan kemudian mengimplementasi rumusan strategii dengan program yang telah ditentukan. Beberapa hal yang umum dilakukan adalah melakukan lobby-lobby, silaturahmi, dan sosialisasi. Pembentukan sistem pengontrol di lapangan juga biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya masyarakat sendiri. Tentunya hal ini bergantung pada lobby-lobby yang telah dilakukan tersebut.

Evaluasi Program dibutuhkan untuk melihat apa saja tindakan dalam program yang tepat dan mana yang tidak sehingga ke depannya bisa dilakukan program yang lebih baik. Evaluasi bisa dibagi menjadi dua yaitu evaluasi ongoing dan end review. Evaluasi ongoing dilaksanakan selama proses berlangsung dan akan menjaga fleksibilitas sebuah program. Sedangkan end review mencakup semua evaluasi dari awal sampai akhir yang akan merangkum semua evaluasi ongoing dan perbaikannya sehingga bisa dijadikan pijakan untuk pelaksanaan program berikutnya.

BAB V

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari yang telah diuraikan oleh peneliti da lam penelelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan tentang, bagaimana strategi Strategi KPU Kabupaten Bangkalan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pilkada antara lain

Strategi atau upaya yang dilakukan KPU kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati antara lain:

- dilakukan KPU untuk memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih akan sesuai yang diinginkan. Strategi ini dalam penerpannya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara dalam hal ini adalah PPK, PPS dan KPPS dan meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi KPU kepada Publik.
- b) Strategi Sosialisasi Politik merupakan salah satu cara yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisiasi pemilih yaitu dengan metode sosialisasi tatap muka (face to face) dan melalui media. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan pertemuan dengan tokoh msyarakat, tokoh

- pemuda, kelompok perempuan dan kelompok mahasiswa. Untuk media yang digunakan adalah media cetak, media masa dan media elektronik.
- c) Strategi Pendidikan Pemilih Pemula merupakan salah satu metode KPU dengan memberikan perhatian secara khusus kepada pemilih pemula, dalam hal ini adalah para pelajar yang duduk di bangku SLTA sederajat, dengan menggandeng Pemilih Pemula.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka disarankan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugas dan wewenang serta dapat mensukseskan pemilihan umum secara maksimal, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain yang terkait. Adapun saran lain, yaitu:

- Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalisasikan peran dan fungsinya dalam mendorong KPU untuk selalu bisa meningkatkan kualitas pemilu dengan meningkatkan partisipasi pemilih.
- 2. KPU Kabupaten Bangkalan diharapakan bisa memiliki terobosan atau upaya baru dalam rangka meningkat partispasi pemilih tidak monoton dan jangkaun dan kuantititasnya diperbanyak lagi.
- 3. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan terutama pemilih pemula atau pemilih muda, kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu ikut mensukseskan pemilu.

- 4. Pelaksanaan Pemilu pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara peneyelenggara (KPU), pemerintah, partai Politik dan masyarakat, perlu ada koordinasi dan kerjasama yang saling menguatkan.
- 5. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD selayaknya dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam arti ada monitoring berkala supaya peniingkatan partisipasi pemilih berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran politik di Kabupaten Bangkalan



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rozaki, Menabur Karisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai Dan Blater Sebagai Rezim Kembar Di Madura, Yogyakarta. (Pustaka Marwa, 2004)
- Ali Saukah, pedoman penulisan karya tulis ilmiah (Malang: ikip malang, 2000)
- Anton Bakker, Achamad Charis Zubair, *metodologi penelitian filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Bryan S. Turner, sosiologi islam: suatu telaah analisis atas tesa sosiologi weber, terj. GA Ticolu (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Burhan Bungin, *metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001)
- George Ritzer, Sociology: A Multiple Paradigm Science (Boston: Allyn and)
- John Obert Voll, *politik islam:* kelangsungan dan perubahan di dunia modern, terj.

 Ajat suderajat (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994)
- S. Takdir Alisyahbana, values as integrating forces in personality, society and culture (Kuala Lumpur: University Of Malay Press, 1997)
- Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 1500-1900, dari Emperium Sampai Imperium, jilid 1, Jakarta, gramedia pustaka utama
- Sudarto, metode penilitian filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sutrisno Hadi, Metodologi Researh, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989)
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: tarsito, 1994)